



IN-DEPTH

2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Capaian dan Tantangan

Oleh Redaksi · 23 Okt, 04.00 WIB



Presiden Republik Indonesia. FOTO/AI for HAI.

Memasuki tahun ketiga, pemerintahan menghadapi tantangan menerjemahkan program prioritas menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga disiplin fiskal, kualitas demokrasi, dan kepercayaan investor.

UA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting

untuk mengevaluasi arah pembangunan Indonesia.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan ini menawarkan agenda besar: memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, memasuki tahun ketiga, pertanyaan yang semakin relevan

bukan hanya seberapa besar program pemerintah dijalankan, melainkan sejauh mana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan program sosial, kondisi lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai keberhasilan dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.

Sejumlah media nasional dan internasional menyoroti dua sisi dari periode ini: ambisi pemerintahan dalam memperluas pembangunan dan besarnya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan The Jakarta Post pada 20 Oktober 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang ...

Selengkapnya di halaman 14 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Hercules Ultimatum Maruarar Sirait: Kau Jangan Pakai Otak Nakal



BANDA ACEH - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marzal memperingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Maruarar Sirait (Ara) masalah sengketa lahan.

Hercules mengaku mengenal sosok Ara sebelum menjadi menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Eks Ajudan Jokowi Dituntut 10 Tahun Penjara Rugikan Negara Rp237 Miliar



BANDA ACEH - Letjen TNI Widi Prasetyojono, mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dituntut 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset tanah negara di Cilacap, Jawa Tengah. Jaksa juga menuntut Widi membayar uang pengganti Rp21,05 miliar, denda Rp500 juta, serta pemecatan dari dinas militer.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
Aneka Berita	14

NASIONAL

Pakar: Ada Informasi Gibran Itu Sebenarnya Tidak Lulus SMP di Indonesia



BANDA ACEH - Pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Pakar hukum tata negara Refly Harun pun ikut mengungkap informasi mengenai riwayat sekolah Gibran di Indonesia.

"Menurut saya, kita penting loh membentuk yang namanya independent fact finding team untuk melihat latar belakang pendidikan Wapres ini," katanya ...

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

NASIONAL

Pakar: Ada Informasi Gibran Itu Sebenarnya Tidak Lulus SMP di Indonesia

Oleh Redaksi · 23 Okt, 20.37 WIB



BANDA ACEH - Pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Pakar hukum tata negara Refly Harun pun ikut mengungkap informasi mengenai riwayat sekolah Gibran di Indonesia.

"Menurut saya, kita penting loh membentuk yang namanya independent fact finding team untuk melihat latar belakang pendidikan Wapres ini," katanya dalam tayangan YouTube Rakyat Bersuara, dikutip Jumat (23/10/2026).

Dalam penjelasannya, Refly mengaku pernah mewawancarai seseorang bernama Luke Susilo yang disebutkan memiliki informasi mengenai pendidikan Gibran.

Informasi tersebut menyangkut dugaan bahwa Gibran tidak menyelesaikan pendidikan SMP di

Indonesia sebelum melanjutkan sekolah ke Orchid Park Secondary School (OPSS), Singapura.

"Saya harus mengatakan ada informasi itu, Luke Susilo, saya pernah interview dia," ungkap Refly.

"Dia katanya pernah mendapatkan informasi misalnya Gibran itu sebenarnya tidak lulus SMP di Indonesia juga," sambungnya.

Refly kemudian memaparkan dugaan perjalanan pendidikan Gibran saat masih berada di tingkat SMP.

Menurutnya, Gibran diduga pindah ke Singapura ketika masih duduk di kelas 2 SMP dan kemudian bersekolah di OPSS.

"Sekitar kelas 2 SMP, nanti koreksi kalau saya salah, ya biasanya nakalnya anak muda zaman dulu dan saya tidak etis mengata-

kan masalah apa, tapi semua orang tahu soal itu. Kemudian dipindahkan ke Singapura kelas 2 SMP, itulah sebabnya dia masuk Orchid Park Secondary School, itu bisa setingkat SMP plus," katanya.

Ia juga mempertanyakan masa pendidikan Gibran di Singapura.

Refly mencontohkan apabila Gibran bersekolah di OPSS pada periode 2002-2004, sementara sebelumnya telah menamatkan SMP di Indonesia, maka riwayat pendidikan tersebut perlu dijelaskan.

"Kalau dia sudah tamat SMP, masuk SMP lagi tuh aneh sebenarnya. Terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan Indonesia dan Singapura," ucapnya.

Tak hanya jenjang SMP, Refly turut menyoroti pendidikan Gibran di UTS Insearch, Austra-

lia, yang disebut sebagai jalur persiapan sebelum melanjutkan studi ke University of Technology Sydney (UTS).

Ia mempertanyakan dokumen yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA.

Refly merujuk pada dokumen yang terungkap dalam persidangan di MK.

Ia menyebut tidak adanya sertifikat penyelesaian pendidikan atau certificate of completion, sementara dokumen yang tersedia berupa sertifikat kehadiran, bukti pendaftaran, dan transkrip nilai.

"Fakta persidangan di MK dia tidak menyertakan certificate of completion, tidak ada sertifikat dia selesai UTS itu, yang ada certificate ...

NASIONAL

Hercules Ultimatum Maruarar Sirait: Kau Jangan Pakai Otak Nakal

Oleh Redaksi · 23 Okt, 20.55 WIB



Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal memperingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) masalah

BANDA ACEH - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal memperingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) masalah sengketa lahan.

Hercules mengaku mengenal sosok Ara sebelum menjadi menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Ara selalu memakai otak nakalnya ketika masih berada di partai lamanya.

"Sekarang kamu menteri di dalam pemerintahan, Presiden yang ke-8. Kau sadar diri, kau jangan pakai otak kamu yang nakal dulu, kamu masih di jalur merah, kamu loncat ke jalur oranye, aku tahu kamu. Ini pejuang, petarung yang aslinya. Untuk pemerintah saat ini, Hercules yang petarung asli, darah merah putih harga mati. Bagaimana pemerintah ini harus dipegang Bapak Presiden Prabowo," ujar Hercules dalam video yang diunggah Instagram GRIB Jaya, dikutip Jumat (23/10).

"Hei Ara Sirait. Kalau kamu benar aku dukung, tapi kamu masih mau pake otak-otak dulu kamu masih di merah, rampok-rampok terus, sekarang kamu menyelamatkan diri, menempel ke biru, terus kamu mau pakai rampok lagi, terus kamu berhadapan dengan saya," ujarnya melanjutkan.

Hercules mengingatkan Ara bahwa lahan yang dipermasalah-

kan telah bebaskan sejak lama dengan uang puluhan miliar.

Ia menegaskan lahan yang ingin diambil Ara bukan lahan kosong.

"Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar. Asal kamu tau. Kamu jangan nanti dikasih pemerintah jadi menteri, terus kamu mau pemerintah merugikan rakyat. Merugikan saya lagi Ara," kata Hercules.

Hercules tidak menjelaskan lokasi lahan yang dirinya kuasai dan bermasalah dengan Ara.

Namun beberapa waktu lalu, Hercules sempat bertemu dengan Ara di lahan dekat rel kereta api di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Polemik lahan di Tanah Abang muncul setelah lahan yang akan dibangun rumah susun untuk rakyat itu diklaim Hercules sebagai milik ahli waris bernama Sulaiman Effendi.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengaku sudah menyambangi lokasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hasilnya, lahan tersebut dipastikan merupakan aset negara.

"Ada pihak lain yang tidak yakin itu tanah negara," katanya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat 17 April 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Dokter Tifa Cekar Sepupu Jokowi soal Foto Ijazah Berkacamata, Kumis juga Jadi Sorotan

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.33 WIB

BANDA ACEH - Terdakwa Tifausia Tyassuma alias Dokter Tifa mencengar saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Dumatno Budi Utomo, dalam persidangan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Adapun Dumatno merupakan sepupu dari Jokowi.

Dalam persidangan, Tifa menggali keterangan Dumatno mengenai kebiasaan Jokowi menggunakan kacamata sewaktu muda.

Sebab dalam foto ijazahnya, Jokowi tampak berkacamata dan memiliki kumis.

"Kan saksi tadi sampaikan bahwa sejak kecil sudah kenal, dekat, sering bertemu dalam acara-acara keluarga dengan Pak Jokowi, gitu. Nah, sebagai seorang dokter, saya curious. Kenapa ada

orang yang anda kenal (waktu) kecil, remaja itu berkacamata, betul begitu? Atau sesekali saja beliau berkacamata? Atau terus-terusan berkacamata atau sesekali saja berkacamata," tanya Tifa.

Dumatno mengaku pernah melihat Jokowi menggunakan kacamata saat Presiden ke-7 itu berusia muda. Akan tetapi waktu pastinya Dumatno tak mengingat.

"Saya kan tidak intens, Ibu. Jadi, saya di sini saya menyampaikan bahwa saya pernah melihat beliau berkacamata," jawab Dumatno.

Menurut Dumatno, kacamata yang dikenakan seseorang bisa saja dipakai untuk menunjang penampilan.

Oleh karenanya dia tak pernah menanyakan kepada Jokowi ketika sedang tidak menggunakan kacamata.

"Saya sendiri juga nggak menanyakan, kadang ada juga buat fashion segala macam kan bisa juga, tapi kan saya tidak menanyakan," kata Dumatno.

Selain soal kacamata, Tifa juga menanyakan mengenai kumis dan rambut Jokowi kepada saksi.

Dumatno mengaku pernah melihat Jokowi berkumis dan berambut gondrong.

"Oke. Sekarang, Pak Jokowi waktu muda pakai kumis atau tidak?" kata Tifa.

"Saya melihat beliau pernah kumisan," jawab Dumatno.

"Pernah pakai kumis, tapi juga pernah tidak?" tanya Tifa lagi.

"Nggak, beliau, beliau dulu agak gondrong, kumisan itu saya pernah (lihat)," kata Dumatno.

NASIONAL

Prabowo Subianto: Malu Saya Jadi Presiden Kalau Rakyat Miskin Terus

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.12 WIB

BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa jabatan presiden bukan sekadar kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dia bahkan mengaku malu dan tidak ingin menjadi Presiden lagi jika masyarakat yang dipimpinnya masih terus hidup dalam kemiskinan.

"Saya tidak mau jadi presiden rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya nggak jadi presiden," ujar Prabowo saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ketua DPD Golkar Pemalang Digarap KPK dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.29 WIB

BANDA ACEH -Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Pemalang, Nur Azmi Wicaksono mendapatkan giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tahun 2025-2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan hari ini tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Nur Azmi sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis sore, 22 Oktober 2026.

Budi menjelaskan, saksi Nur Azmi sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 09.11 WIB.

KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 27-28 Juli 2026 setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang.

Dari penyelidikan tertutup, KPK menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaan, Mohamad Haris alias Gus Haris, terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Eks Ajudan Jokowi Dituntut 10 Tahun Penjara Rugikan Negara Rp237 Miliar

Oleh Redaksi · 23 Okt, 19.24 WIB



BANDA ACEH - Letjen TNI Widi Prasetyono, mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dituntut 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset tanah negara di Cilacap, Jawa Tengah. Jaksa juga menuntut Widi membayar uang pengganti Rp21,05 miliar, denda Rp500 juta, serta pemecatan dari dinas militer. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta pada Kamis (22/10/2026).

Perkara ini berkaitan dengan transaksi lahan perkebunan Caruy seluas 716,2 hektare yang disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp237,09 miliar.

Jaksa menilai Widi terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama tiga terdakwa lain, yakni mantan Asisten Perencanaan Kodam IV/Diponegoro Kolonel

Inf Wisnu Kurniawan, mantan Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro Kolonel Chk Sjaiful Nursaid, dan mantan Direktur Operasional PT Rumpun Sari Antan (RSA) Suko Madyo Susilo.

Selain pidana penjara, jaksa meminta Widi dipecat dari dinas militer. Pengabdian selama 33 tahun sebagai prajurit TNI menjadi pertimbangan yang meringankan.

Namun, sikap terdakwa yang dinilai tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan kerugian negara menjadi faktor yang memberatkan.

"Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Diduga Terima Aliran Dana Rp21,05 Miliar

Dalam perkara tersebut, Widi diduga menerima aliran dana Rp21,05 miliar melalui rekening perantara milik dua adik iparnya.

Jaksa menguraikan dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain membeli tanah, membangun rumah kos di Semarang, membeli kendaraan mewah, dan membiayai usaha peternakan ayam.

Jaksa juga menilai posisi Widi sebagai Pangdam IV/Diponegoro seharusnya menjadi teladan bagi prajurit di bawah komandonya.

Kasus ini bermula dari transaksi lahan perkebunan Caruy di Kecamatan Cipari, Cilacap, senilai Rp237,09 miliar kepada PT Cilacap Segara Artha (CSA).

Lahan tersebut merupakan aset negara yang penguasaannya berada di bawah Kodam IV/Diponegoro

melalui Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip).

Meski transaksi berjalan dan PT CSA telah mengeluarkan dana, perusahaan itu disebut tidak dapat menguasai maupun memanfaatkan lahan tersebut secara sah.

Persoalan pengalihan aset negara itu kemudian menjadi bagian penting dalam perkara korupsi tersebut.

Jaksa turut mengajukan tuntutan terhadap tiga terdakwa lainnya. Wisnu Kurniawan dituntut empat tahun penjara, denda Rp500 juta, dan uang pengganti Rp2,76 miliar.

Sementara itu, Sjaiful Nursaid dituntut enam tahun penjara, denda Rp500 juta, pemecatan dari dinas militer, serta uang pengganti sekitar Rp3,22 ...

NASIONAL

Jimly Asshiddiqie: Politisi Tanpa Gelar Akademik Tetap Berhak Memimpin

Oleh Redaksi · 23 Okt, 21.07 WIB



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar syarat ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden dikaji untuk dihapuskan.

Menurut dia, dalam sistem demokrasi, mandat rakyat semestinya menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin Politik.

Dalam diskusi di kanal YouTube Total Politik, Jimly membedakan persyaratan bagi pejabat politik yang dipilih melalui pemilu (elected office) dengan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menilai persyaratan pendidikan yang ketat lebih relevan diterapkan pada birokrat daripada kandidat yang memperoleh mandat langsung dari rakyat.

"Walaupun sebetulnya yang ketat pakai ijazah itu (seharusnya) untuk ASN. Sedangkan untuk politik, ini soal perwakilan. Untuk pendidikan politik kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, presiden dan wakil presiden enggak usahlah (pakai syarat ijazah). Supaya ada orang yang enggak sekolah sekalipun, kalau rakyat bisa percaya, kenapa tidak?" urai Jimly.

Untuk mendukung pandangannya, Jimly menyinggung sistem di Jerman.

Ia mencontohkan bahwa individu dengan rekam jejak kontroversial, termasuk mantan simpatisan Nazi, dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk merepresentasikan aspirasi tertentu.

Namun, menurut dia, terdapat perbedaan antara jabatan politik

dan posisi dalam institusi pelayanan publik.

Jimly juga mengkritik perdebatan mengenai keaslian ijazah dan keabsahan dokumen pendidikan yang terus berulang sejak Pilpres 2004.

Ia menilai polemik tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kedaulatan rakyat masih perlu diperkuat.

"Berarti tingkat peradaban demokrasi kita ini baru setingkat kertas ijazah. Kita belum meyakini betul bahwa semua rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak menentukan (pemimpinnya)," keluhnya.

Jimly menegaskan bahwa usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik persyaratan pencalonannya.

Ia menyebut gagasan itu sebagai pemikiran mengenai desain ketatanegaraan untuk jangka panjang.

Sementara itu, Jimly berpandangan bahwa persyaratan pendidikan bagi calon anggota legislatif tetap perlu dipertahankan.

Bahkan, menurut dia, standar tersebut dapat ditingkatkan hingga tingkat sarjana (S1) untuk mendukung kapasitas para legislator dalam menjalankan tugasnya.

Ia membedakan kebutuhan tersebut dengan jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam pandangannya, kepercayaan pemilih dan mandat demokratis perlu mendapat tempat utama dalam menentukan siapa yang layak memimpin negara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Siap-siap Jemput Paksa Nusron!

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.24 WIB

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi menerbitkan surat perintah membawa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya.

Nusron tercatat tidak memenuhi panggilan penyidik KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kedua ketidakhadiran itu disebut karena adanya agenda lain pada waktu yang bersamaan.

Akibatnya, hingga kini penyidik belum memperoleh keterangan langsung dari Nusron terkait perkara yang menyeret sejumlah pejabat pertanahan, politikus, dan pihak swasta sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mempertimbangkan langkah

hukum berikutnya, termasuk kembali melayangkan surat panggilan dan kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa.

"Saat ini, Penyidik KPK masih proses untuk upaya-upaya berikutnya, termasuk kemungkinan untuk menerbitkan surat panggilan lagi, apakah kemudian juga nanti beserta dengan surat perintah membawa atau seperti apa, nanti kita akan lihat perkembangannya. Tentu kami berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, khususnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN," kata Budi di Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam.

Budi menegaskan, keterangan Nusron dinilai penting bagi penyidik untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan pengurusan HGB dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Meski opsi surat perintah membawa telah disebutkan, KPK

belum memastikan kapan pemanggilan berikutnya dilakukan maupun apakah langkah tersebut akan ditempuh.

2 Kali Mangkir dari KPK, Nusron Muncul di Istana dan Kembali ke Kantor ATR/BPN

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah orang serta barang bukti berupa uang rupiah dan valuta asing dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.

KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah menilai telah memiliki kecukupan dua alat bukti yang sah.

Mereka adalah Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq ...

NASIONAL

Momen Seskab Teddy Beri Sinyal untuk Akhiri Pidato, Prabowo: Gue Nih Presiden, Ted!

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.16 WIB

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto berseloroh setelah mendapat isyarat dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk mengakhiri pidato. Momen tersebut terjadi saat Prabowo memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Prabowo mengawali acara dengan mengecek kehadiran para menteri dan pejabat negara yang mengikuti kegiatan tersebut. Dia menyebut sejumlah jajaran menteri, kepala badan, Gubernur Bank Indonesia (BI), hingga Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden kemudian mengecek daftar gubernur dan wakil gubernur yang hadir sebagai peserta ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

PSI: Dimaki Gak Tumbang, Jokowi Bikin Pusing Banyak Orang

Oleh Redaksi · 23 Okt, 19.22 WIB



BANDA ACEH - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menyoroti sikap pihak-pihak yang terus menyerang Joko Widodo (Jokowi), termasuk melalui polemik ijazah yang turut menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai, kebencian terhadap mantan presiden tersebut justru memunculkan paradoks karena berbagai serangan justru tidak banyak mempengaruhi sikap Jokowi.

Olehnya itu, ia menilai sosok Jokowi kerap membuat banyak orang kebingungan karena tetap tenang meski menerima beragam kritik dan makian.

"Kebencian irrasional dan tokoh seperti Jokowi ini memang agak paradoks dan bikin pusing banyak orang," tulisnya di akun X, dikutip Jumat (23/10/2026).

"Dimaki-maki ngga tumbang, dipuji-puji juga biasa saja," sambung Dedy.

Menurut Dedy, tujuan Jokowi selama menjabat sebagai presiden bukan sekadar menghadapi kritik atau mengejar pujian. Ia menyebut Jokowi memiliki keinginan agar Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan menilai hal itu telah dibuktikan selama dua periode kepemimpinannya.

"Yang ia mau sebenarnya sederhana, Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan ia sendiri membuktikan itu saat menjabat sebagai presiden dua periode," ujarnya.

Dedy juga menyoroti pihak-pihak yang masih menjadikan Jokowi sebagai sasaran oposisi, meskipun pemerintahan saat ini

dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Sekarang rezim dan tantangan zamannya sudah ngga sama, tapi para pembenci masih saja berpikir kalau Jokowi adalah presidennya," sebut dia.

Ia pun menyindir pola perlawanan Politik yang dinilainya lebih tertuju kepada Jokowi ketimbang pemerintahan yang sedang berjalan.

"Makanya ada istilah 'beroposisi pada Jokowi' bukan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Aneh bin ajaib," tutup Dedy.

Sebelumnya, Jokowi sendiri mengaku menyadari adanya pihak yang berupaya menyerang dirinya dan Gibran melalui polemik ijazah.

"Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik,

kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

Jokowi menduga tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya dan Gibran berpotensi digunakan untuk merusak reputasi politik keduanya.

"Ya bisa saja seperti itu. Bisa saja sekali lagi operasi politik untuk down grade reputasi politik seseorang. Dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran)," ujarnya.

Meski tuduhan terus bergulir, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan berbagai serangan yang diarahkan kepada dirinya maupun keluarganya.

"Buat saya ya biasa saja," imbuhnya.

NASIONAL

Istigasah Kubro, KPK NU: Tangkap dan Adili Nusron Wahid

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17.44 WIB



Massa yang mengatasnamakan KPK Nahdlatul Ulama (KPK NU) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan mengadili Menteri Agraria dan Tata

RUANG/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Desakan itu disampaikan melalui Istigasah Kubro bersama kiai kampung di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore, 23 Oktober 2026.

Koordinator KPK NU, Muhammad Sholihin, menuding sejumlah pihak telah mencederai marwah NU.

Ia menyebut Nusron Wahid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Juri Ardiantoro, serta sejumlah kiai sebagai pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban terkait polemik dugaan penggunaan uang hasil korupsi untuk kepentingan Muktamar ke-35 NU di Jombang.

"Bagi kami KPK NU, itu berarti oknum anasir-anasir jahat yang coba menjatuhkan marwah Nahdlatul Ulama, betul?" ujar Sholihin dalam orasinya yang disambut jawaban setuju dari massa.

Sholihin juga mempersoalkan proses pemilihan Rais Aam PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Ia mengklaim mekanisme tersebut tidak mencerminkan pilihan mayoritas peserta muktamar.

"Tapi Nusron, Gus Ipul, dan juga Juri Ardiantoro berada di dalam satu meja melakukan anasir jahat untuk memilih Kiai Haji

Miftachul Choer sebagai Rais Aam, padahal Kiai Haji Miftachul Choer adalah bukan suara terbanyak!" katanya.

Menurut Sholihin, mayoritas peserta muktamar memilih KH Nurul Huda Djazuli.

Ia menilai proses yang dipersoalkannya itu bermasalah secara moral dan bertentangan dengan aturan di lingkungan NU.

Atas dasar itu, ia meminta KPK menindaklanjuti dugaan yang disuarakan massa aksi.

Sholihin menuding Nusron sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penggunaan uang hasil korupsi dalam penyelenggaraan muktamar.

Ia juga mempertanyakan alasan Nusron bepergian ke luar negeri ketika dipanggil penyidik KPK sebagai saksi.

"Maka kami hadir yang kedua kalinya, KPK NU dalam rangka Hari Santri Nasional.

KPK NU menegaskan kembali dengan tema aksi ini istighosah kubro bersama kiai kampung agar KPK RI jangan takut, jangan bimbang, segera tangkap dan adili Nusron CS, betul?" serunya.

Seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, massa mengenakan kaus putih bertuliskan KPK NU dan membawa bendera Merah Putih serta bendera hijau berlogo NU.

Mereka juga membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan penangkapan dan pengadilan terhadap pihak-pihak yang mereka tuding terkait polemik Muktamar ke-35 NU.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

UAS Puji Cak Imin sebagai Striker Paling Hebat di Partai Politik

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.13 WIB

BANDA ACEH - Pendakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) menilai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai sosok yang mampu mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Kemampuan tersebut dinilai menjadi salah satu modal penting bagi seorang politikus dalam menjalankan peran dan menghadapi dinamika Politik.

Penilaian itu disampaikan UAS saat menerima kunjungan silaturahmi Gus Muhaimin bersama sejumlah petinggi PKB di kedia-

mannya, Ma'had Az Zahra, Kampar, Riau, Kamis, 22 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Muhaimin memimpin apel Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Dar el Hikmah, Pekanbaru.

Dalam pertemuan itu, UAS menekankan bahwa kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir, tetapi juga dari kecakapan mengendalikan emosi.

"Jadi, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Lantik Lima Pejabat Eselon I, Suahasil Copot Sekjen Era Purbaya

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17.41 WIB



BANDA ACEH -Menteri Keuangan Suahasil Nazara merombak jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya, pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Dalam perombakan tersebut, Astera Primanto Bhakti, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu, naik dari posisi sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ia menggantikan Sekjen era eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Robert Leonard Marbun.

Selain Astera, Suahasil melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nuf-ransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, serta Hidayat Amir sebagai Staf

Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

Suahasil menegaskan, pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenkeu memperkuat organisasi dan beradaptasi menghadapi tantangan ke depan. Pelantikan juga berlangsung menjelang peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada akhir Oktober ini.

"Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi," kata Suahasil saat pelantikan.

Suahasil meminta Sekretariat Jenderal Astera mampu memberikan dukungan nyata bagi seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Kemenkeu.

Ia menilai Astera memiliki pengalaman panjang di Kemen-

keu, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, hingga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal, Astera menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Sementara itu, Tri Budhianto mendapat tugas melanjutkan transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), terutama melalui digitalisasi dan penguatan tata kelola.

Suahasil menekankan, modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara harus dibarengi pembena-han proses bisnis agar pelayanan kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat semakin efektif.

"DJPb, Jenderal Perbendaharaan harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Saya minta ini dilan-

jutkan dengan memperkuat tata kelola, penguatan proses bisnis, dan kemudian pengembangan dari modern treasury operations," ujarnya.

Transformasi tersebut, kata Suahasil, juga mencakup penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening penerima, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga pengembangan sistem pembayaran pensiun yang terhubung langsung dengan rekening para pensiunan melalui kas negara.

Adapun kepada Nuf-ransa Wira Sakti, Suahasil meminta agar sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkuat untuk memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.

NASIONAL

Sepupu Ngaku Tak Tahu Pasti soal Jokowi Kuliah di UGM, Hanya Tahu dari Obrolan Keluarga

Oleh Redaksi · 23 Okt, 19.29 WIB



BANDA ACEH - Sidang lanjutan perkara dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tyas-suma alias Dokter Tifa kembali menghadirkan kesaksian yang menarik perhatian.Dumatno Budi Utomo, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi, tetapi tidak mengetahui secara terperinci riwayat pendidikan sang mantan presiden.

Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Di hadapan majelis hakim, Dumatno menjelaskan bahwa hubungan keluarganya dengan Jokowi berasal dari garis kakek dan nenek mereka yang merupakan kakak beradik.

Meski masih memiliki ikatan keluarga, Dumatno mengatakan interaksi intensif dengan Jokowi baru dirasakannya ketika masa sekolah. Keduanya juga bertemu dalam berbagai acara keluarga dan perayaan hari raya yang rutin digelar di Solo.

Ketika majelis hakim dan tim kuasa hukum terdakwa menggali informasi mengenai pendidikan tinggi Jokowi, Dumatno mengaku hanya mengetahui bahwa Jokowi pernah menempuh studi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti kapan Jokowi mulai

kuliah maupun menyelesaikan pendidikannya.

"Secara langsung kalau status terkait itu (perkuliahan Jokowi) saya tidak (tahu). Tapi kan di (cerita) keluarga dulu, beliau kan cita-citanya ingin untuk kerja di kehutanan gitu," ungkap Dumatno.

Ia menjelaskan, informasi mengenai pendidikan Jokowi lebih banyak didengarnya melalui obrolan di lingkungan keluarga besar. Karena itu, ia tidak dapat memastikan tahun-tahun yang berkaitan dengan perjalanan akademik Jokowi.

"Kalau tahun-tahun pastinya saya tidak ingat, tetapi hal itu sering menjadi bahan obrolan dalam pertemuan keluarga besar," kata Dumatno.

Dumatno juga mengungkapkan bahwa dirinya masih berusia sekitar delapan tahun ketika Jokowi menyelesaikan kuliah. Kondisi tersebut membuatnya tidak mengi-kuti secara langsung proses pendidikan yang dijalani Jokowi hingga lulus.

Tak hanya soal riwayat kuliah, Dumatno turut menyampaikan keterangannya ketika ditanya mengenai ijazah Jokowi yang menjadi pokok polemik dalam perkara tersebut. Ia mengaku belum pernah melihat dokumen pendidikan itu secara langsung.

"Terkait ijazah yang ditampilkan ini, beliau juga belum pernah (menunjukkannya)," sebut Dumatno.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pengamat: Jika Pemakzulan Gibran Tidak Terjadi, Maka Besar Kemungkinan karena...

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.05 WIB

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perkembangan berarti di DPR RI meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikannya telah dibacakan.Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai lambannya proses tersebut tidak lepas dari pilihan Politik Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dedi, dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen membuat tindak lanjut terhadap polemik ijazah Gibran sulit bergerak tanpa persetujuan atau setidaknya pembiaran dari Presiden. Ia menilai stabilitas politik dan keharmonisan koalisi menjadi pertimbangan penting dalam

menentukan arah sikap pemerin-tah.

"Jika tidak terjadi pemakzulan, maka besar kemungkinan karena faktor presiden menahan diri untuk tidak mengamputi seluruh kekuasaan keluarga Jokowi. Meskipun harus mengorbankan kehendak rakyat, termasuk mencederai wibawa konstitusi," kata Dedi dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/10/2026).

Dalam analisisnya, Prabowo diprediksi lebih mengutamakan stabilitas politik selama masa transisi pemerintahan daripada merespons tekanan publik setelah muncul pertimbangan hukum dari MK. Dedi melihat belum adanya dorongan kuat untuk memakzulkan Gibran sebagai bagian dari kecenderungan tersebut.

"Sepertinya Presiden Prabowo punya kecenderungan tidak mendorong pemakzulan. Presiden sejauh ini lebih nyaman dengan stabilitas, utamanya jika berkaitan dengan keluarga Jokowi," ujar Dedi.

Polemik ijazah Gibran bermula dari permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak ke MK melalui perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam putusan pada 6 Oktober lalu, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat milik Gibran. Namun, putusan tersebut tidak berujung pada diskualifikasi

Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.

MK menjelaskan bahwa pihaknya tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran melalui perkara yang diajukan. Permohonan tersebut juga dinilai tidak tepat secara substansial untuk diproses melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, para pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum.

MK turut menegaskan bahwa persoalan tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA atau sederajat milik Gibran merupakan ranah lembaga lain. Hingga kini, polemik tersebut masih menjadi perbincangan publik dan mendapat perhatian DPR RI, tetapi parlemen belum menunjukkan sikap tegas untuk menindaklanjutinya.

NASIONAL

Hari Purwanto Sentil Keras Wacana Korupsi Tanpa Kerugian Negara : Ini Cara Jahat Hindari Jerat Hukum

Oleh Redaksi · 22 Okt, 16.04 WIB

BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar konsisten menjalankan komitmen pemberantasan korupsi dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hari menilai, apabila kerugian negara tidak lagi menjadi unsur penting dalam pemaknaan tindak pidana korupsi, hal itu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghindari pertanggungjawaban hukum.

"Jika kerugian negara bukan lagi definisi korupsi, maka ini cara penjahat yang menjabat menghindari dari jerat hukum. Hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas menjadi nyata," kata Hari

dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Aktivis 98 itu menilai permainan istilah dan pemaknaan hukum tidak boleh menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari proses hukum. Menurutnya, ketentuan pemberantasan korupsi yang berlaku semestinya menjadi landasan untuk menindak pelanggaran secara tegas dan adil.

Hari juga mengingatkan kembali pesan Prabowo pada awal pemerintahannya mengenai pemberantasan korupsi.

"Saya ingat pesan Presiden di awal pemerintahan, ikan busuk dari kepala," ujarnya.

Menurut Hari, komitmen pemberantasan korupsi perlu tercermin dalam tindakan nyata, termasuk memastikan lembaga penegak ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Doli Kurnia Sarankan Nusron Wahid Hadapi KPK: Kalau Tak Merasa Melanggar Datang Saja

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.31 WIB



BANDA ACEH - Kasus hukum yang menyeret nama Politikus Partai Golkar Nusron Wahid, direspons Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Sebagai seorang sahabat, Doli menyarankan agar Menteri ATR/BPN itu memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor tersebut.

Menurut Doli, sebagai warga negara yang patuh hukum, Nusron tidak boleh menghindar dan berani menghadapi proses yang sedang berjalan.

"Kepada sahabat saya, Saudara Nusron, saya kira kalau memang kita merasa tidak pernah melakukan pelanggaran apa-apa, kalau

dipanggil ya datang saja. Jelaskan saja semuanya," kata Doli Kurnia saat menjadi narasumber dalam sebuah podcast di YouTube bertajuk "Ahmad Doli Blak-blakan Soal Pasal Selundupan Pencalonan Gibran | NGOCAK FEBBY" dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Doli berpandangan bahwa kehadiran Nusron Wahid untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan penyidik KPK sangat penting.

Oleh karena itu, sikap kooperatif dari pihak-pihak yang bakal digali keterangannya sangat dibutuhkan agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Doli mengingatkan bahwa polemik hukum yang terus bergulir tersebut harus segera diakhiri dan tidak boleh dibiarkan berkepanjangan.

"Ini polemik yang harus segera diakhiri, jangan berkepanjangan. Apalagi ini masalah hukum. Hukum tidak boleh dipertainkan," tegas Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar ini.

Doli khawatir, jika kejelasan hukum dibiarkan menggantung, tatanan bernegara akan rusak dan berubah menjadi hukum rimba yang bisa memancing kemarahan publik.

Di sisi lain, Doli juga menyoroti langkah komisi antirasuah. Ia meminta KPK untuk segera memberikan penjelasan yang utuh terkait duduk perkara yang menyeret nama koleganya tersebut.

Ia mengaku sempat menyayangkan sikap KPK sebelumnya yang secara tiba-tiba mengumumkan nama Nusron, padahal informasi terkait dugaan keterlibatannya

belum dapat dipastikan kebenarannya.

Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa kepastian, Doli memperingatkan bahwa kasus ini akan membawa efek domino yang sangat merugikan.

Kerugian tersebut tidak hanya ditanggung secara personal oleh seorang Nusron Wahid.

"Ini bukan hanya menyangkut soal nama baik teman saya sendiri. Ini akan menyangkut nama baik kami semua di Partai Golkar," tegas Doli.

Lebih jauh, Doli menyebut skandal hukum ini berpotensi mencoreng wajah pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

NASIONAL

Jimly Minta Publik Move On dari Polemik Ijazah Gibran: Ya Gimana, Dia Sudah jadi Wapres

Oleh Redaksi · 23 Okt, 20.28 WIB



BANDA ACEH - "Tidak usah baper," menjadi pesan tegas yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta masyarakat lebih rasional dan dewasa dalam menyikapi dinamika Politik yang masih berlangsung setelah Pilpres 2024. Jimly menilai perdebatan berkepanjangan mengenai latar belakang pendidikan Gibran hanya menghabiskan waktu dan energi. Menurutnya, polemik tersebut tidak mengubah status Gibran yang telah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Ada orang ngabisin waktunya urusan ijazah. Ada yang masih kecewa kepada Gibran. Terus, ya bagaimana? Dia sudah jadi wapres," tuturnya, Jumat (23/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan ketika isu ijazah Gibran kembali menjadi perhatian publik. Jimly mengingatkan bahwa masyarakat perlu menerima realitas politik yang sudah terbentuk tanpa terus terbawa sentimen pribadi terhadap sosok yang kini menduduki jabatan wakil presiden.

Ia juga menyinggung hubungan politik Gibran dengan Presiden

Prabowo Subianto. Menurut Jimly, Prabowo sendiri yang meminta Gibran menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2024, sehingga keputusan tersebut merupakan bagian dari pilihan politik yang membentuk pemerintahan saat ini.

"Presiden sendiri yang minta supaya Gibran menjadi wakilnya. Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih presiden. Tidak mungkin Pak Prabowo mau memberhentikan wakilnya, sedangkan dia sendiri yang minta Gibran jadi wapresnya," kata Jimly.

Pernyataan itu sekaligus menjadi alasan Jimly menilai pemberhentian Gibran oleh Prabowo tidak mungkin terjadi di tengah polemik yang kembali mencuat. Ia menempatkan keputusan pencalonan pada Pilpres 2024 sebagai konteks penting dalam memahami posisi politik keduanya.

Meski demikian, pandangan Jimly mengenai polemik tersebut merupakan penilaiannya terhadap situasi politik yang berlangsung. Pesannya kepada masyarakat tetap sama, yakni menyikapi perbedaan pendapat secara dewasa dan tidak membiarkan sentimen pribadi mendominasi perdebatan.

"Tidak usah baper," pungkas Jimly.

NASIONAL

Yusril Dukung Usulan Luhut, Sebut Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa

Oleh Redaksi · 22 Okt, 18.58 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra mendukung rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia menilai definisi korupsi di Indonesia perlu diperbaiki agar selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC). Dukungan itu disampaikan setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian mengenai perubahan definisi tindak pidana korupsi. Yusril menyebut persetujuan prinsip tersebut dapat mempermudah pemerintah membahas perbaikan regulasi.

"Saya kira Pak Luhut sudah bicara dengan Presiden, prinsipnya Pak Presiden sudah setuju. Kalau sudah seperti itu sebenarnya memudahkan kami untuk mulai memikirkan perbai-

kan UU Korupsi itu sendiri," kata Yusril usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurut Yusril, definisi korupsi dalam undang-undang Indonesia selama ini masih bertumpu pada unsur kerugian negara. Ia menilai penyesuaian dengan standar internasional diperlukan agar aturan pemberantasan korupsi memiliki landasan yang lebih tepat.

"Jadi, kita akan lebih fokus, banyak negara sebenarnya hanya pada kasus bribery saja, Malaysia pun saya kira kasusnya seperti itu juga."

Sehari sebelumnya, Luhut mengaku telah menyampaikan hasil kajian tim DEN kepada Prabowo. Ia berpendapat bahwa unsur kerugian negara dalam definisi korupsi berpotensi membebani aktivitas bisnis, termasuk kegiatan yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

2 Tahun Berkuasa, Komunikasi Prabowo Makin Sering Blunder

Oleh Redaksi · 22 Okt, 16.09 WIB

BANDA ACEH - Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan, blunder komunikasi Presiden Prabowo Subianto makin sering terjadi selama dua tahun berkuasa.

Catatan LAB 45, blunder komunikasi Praboro meningkat dari 32 kasus pada tahun pertama menjadi 48 kasus pada tahun kedua berkuasa.

Secara proporsi, kontribusinya terhadap keseluruhan blunder komunikasi pejabat Kabinet Merah Putih juga bertambah dari 19,6 persen menjadi 34,3 persen.

"LAB 45 mencatat 303 blunder komunikasi pejabat kabinet sepanjang 20 Oktober 2024-19 Oktober 2026," kata Jaleswari Pramodha-

wardani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10).

"Dengan total 80 blunder, Presiden menjadi penyumbang terbesar; menteri dan wakil menteri menyumbang 164," ucapnya. Selebihnya adalah blunder oleh pejabat kabinet lainnya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, jumlah blunder komunikasi pejabat publik sebenarnya mengalami penurunan dari 163 kasus pada tahun pertama menjadi 140 kasus pada tahun kedua pemerintahan.

Namun, blunder komunikasi yang dilakukan Prabowo justru meningkat dari 32 menjadi 48 kali.

Menurut Jaleswari, temuan tersebut memperlihatkan bahwa blunder komunikasi pemerintah

semakin terkonsentrasi pada pucuk pimpinan.

Kondisi ini menjadi catatan penting, karena pernyataan Presiden memiliki jangkauan luas dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, LAB 45 menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mengutamakan akurasi, konsistensi, dan kesesuaian informasi dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Penyampaian pesan kepada publik dinilai tidak cukup hanya dilakukan secara cepat, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks dan dampaknya.

Ia mengungkapkan, Desember 2025 menjadi salah satu periode

dengan catatan blunder komunikasi paling menonjol.

Pada bulan tersebut, LAB 45 mendata 27 blunder komunikasi pejabat, angka tertinggi selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Periode itu bertepatan dengan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 yang dikutip dalam laporan LAB 45, bencana tersebut menyebabkan 969 orang meninggal dunia dan hampir 900 ribu warga mengungsi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Geledah Kantor BPK Jateng, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.35 WIB



BANDA ACEH -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta Rupiah saat menggeledah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Semarang, Kamis, 22 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, termasuk dugaan suap untuk menghapus temuan audit BPK.

Selain kantor BPK Jateng, penyidik menggeledah dua rumah pihak terkait. Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE)

yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kabupaten Klaten, bahwa pada Kamis, penyidik melakukan penggeledahan pada tiga lokasi di wilayah Semarang," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat pagi, 23 Oktober 2026.

Lokasi pertama adalah Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng, sedangkan dua lokasi lainnya merupakan rumah pihak terkait.

"Selain itu, saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, penyidik juga menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta Rupiah," pungkas Budi.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten

Klaten pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 23 orang di tiga lokasi, yakni Klaten, Surakarta, dan Jakarta.

Dari jumlah tersebut, 10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri dari Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten, Agus Suprpto selaku Inspektur Daerah Pemkab Klaten, Muh Himawan Purnomo selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Klaten, Fadzar Indriawan selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkab Klaten.

Selanjutnya, Rizqan Iryawan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Klaten, Bramantya

Samuel Rizkiargyanto selaku ajudan bupati, Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative (MWC), Hanaku Agni Sadewo selaku adik bupati, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jateng, serta Iwan Hery Setiawan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Perwakilan Jateng.

Dalam perkara ini, KPK mengungkap lima klaster dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Klaten, pejabat pemerintah daerah, pejabat BPK, dan pihak swasta.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk menghapus temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025.

NASIONAL

Bonatua Silalahi Tantang Bawaslu Berani Panggil Wapres Gibran soal Suket Penyetaraan

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17.49 WIB



JAKARTA - Peneliti Bonatua Silalahi menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu.

Dia pun menantang Bawaslu berani memanggil Wapres Gibran.

"Jadi kalau ini nanti mereka periksa dulu. Kalau ternyata dibutuhkan, mereka bisa panggil. Harapan kita semoga Bawaslu berani memanggil, karena bukti-bukti yang kami bawa ini baru. Saya rasa mereka juga akan tercegang melihat bukti-bukti saya," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Dia meyakini, Bawaslu akan melakukan kajian awal terlebih dahulu sebelum menentukan langkah lanjutan.

Namun, dia mendorong Bawaslu agar menggunakan momentum laporan masyarakat ini untuk menagih transparansi dan membuka akses data penataan dokumen calon dari KPU secara komprehensif.

"Sekaranglah saatnya Bawaslu datang ke KPU untuk meminta akses semua data ini dengan alasan PA 212 siap bersatu dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong pemakzulan Gibran jika yang bersangkutan tidak segera mengundurkan diri secara terhormat.

NASIONAL

PA 212 Siap Turun Makzulkan Gibran, Pesan Habib Rizieq: Bersihkan Jaringan Solo!

Oleh Redaksi · 22 Okt, 12.10 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Ustaz Sobri Lubis, melontarkan peringatan keras kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Ia menyatakan bahwa PA 212 siap bersatu dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong pemakzulan Gibran jika yang bersangkutan tidak segera mengundurkan diri secara terhormat.

Ancaman pemakzulan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Sobri dalam siniar (podcast) milik Refly Harun pada Rabu (21/10/2026).

"Apabila Gibran tidak mundur secara terhormat, ya mungkin kita akan melaksanakan juga, bersatu dengan masyarakat yang lain untuk memakzulkan Gibran," tegas Sobri.

Selain menargetkan kursi Wakil Presiden, Sobri turut menyampa-

nya mereka yang memiliki akses tersebut," kata Bonatua.

Apabila dalam pemeriksaan Bawaslu ditemukan unsur pidana pemilu, Bonatua berharap penanganan kasus ini dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan gabungan unsur Bawaslu, polisi dan kejaksaan.

Bonatua membeberkan poin utama materi gugatannya yang menasar KPU dan Gibran.

Terhadap KPU, dia menilai lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah alpa atau sengaja melangkahi prosedur verifikasi syarat calon.

Menurut dia, KPU seharusnya menganalisis pemenuhan syarat pada Pasal 169 huruf r terlebih dahulu sebelum melangkah ke persyaratan administratif berikutnya pada Pasal 227 melalui Peraturan KPU (PKPU).

Sementara untuk pihak Gibran, laporan berfokus pada keabsahan dokumen kualifikasi pendidikan yang diserahkan saat pendaftaran.

Bonatua mempertanyakan klaim penyetaraan pendidikan UTS Inse-arch yang diajukan oleh Gibran.

"Gibran juga kita laporkan. Kenapa mengajukan UTS Inse-arch seakan-akan itu sederajat dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," katanya

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Francesca Albanese: Tentara-Tentara Israel yang Liburan di Indonesia Harus Ditangkap

Oleh Redaksi · 22 Okt, 18.51 WIB

BANDA ACEH - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese mengingatkan pemerintah punya tanggung jawab menangkap tentara Israel yang datang dan bertamasya ke Indonesia.

Menurut dia, sikap tersebut sebagai respons sebuah negara yang tak menghendaki pengabaian terhadap pelaku genosida lenggang kangkung di sebuah wilayah berdaulat hukum.

"Saya tidak mendorong anda untuk melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi," kata Albanese saat diskusi bersama Amnesty Internasional Indonesia di Taman Ismail Marzuki (TIM), di Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam.

Menurut dia, di Israel sendiri, ada warga yang juga turut membantu perlawanan terhadap pemerintahannya sendiri dalam melakukan apartheid, dan genosida di Palestina.

"Tetapi itu tidak banyak. Tetapi ada," kata Albanese.

Namun kata dia, ketika ada tentara penjajahan Israel yang pamer perbuatannya di media sosial (medsos) usai melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina.

Lalu melakukan kegiatan liburan di negara seperti Indonesia, aparat keamanan semestinya mengambil tindakan hukum dengan melakukan penangkapan.

"Jika ada tentara yang datang ke sini setelah membunuh orang-orang Palestina, dan dia bahkan merayakan itu di TikTok, di Tele-

gram, di Facebook, di Instagram, mereka harus dianggap sebagai tersangka," kata Albanese.

Indonesia, sebagai negara yang berdaulat hukum memiliki tanggung jawab dalam meneliti, dan memastikan para pelaku genosida itu tak datang bertamasya setelah melakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina.

"Seperti yang juga terjadi di negara lain. Dan ini juga harus terjadi di negara ini (Indonesia), jika tidak ingin kita melihat normalisasi terhadap apartheid," kata Albanese.

Menurut Albanese memang ada terlihat kegamangan, atau keraguan otoritas negara dalam melakukan penangkapan tentara-tentara penjajahan Israel itu.

Hal tersebut, kata Albanese mungkin saja karena memang khawatir atas adanya tekanan-tekanan dari negara, ataupun kelompok jaringan lain pendukung genosida di Palestina.

Namun kata Albanese, kondisi tersebut memberi ruang bagi masyarakat sipil dapat mengambil sikap dengan menekan pemerintahannya sendiri untuk menolak, dan tak menerima negaranya menjadi lokasi piknik bagi tentara penjajahan usai melakukan genosida di Palestina.

"Seperti yang saya katakan, itu memang tergantung pada sikap pemerintahnya. Dan terkadang memang terlihat kurang punya kapasitas dalam menahan tekanan-tekanan yang datang dari luar," kata Albanese.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Berkaca Kasus Gibran, DPR Minta Syarat Ijazah Capres-Cawapres Diperketat dan Diperjelas

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.27 WIB



BANDA ACEH -Persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden harus tetap dipertahankan, bahkan diperketat. Ketentuan tersebut juga perlu diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Pemilu agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia merespons polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang disorot sebagai ‘pasal selundupan’ terkait persyaratan pendidikan calon, setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Doli menilai, usulan sejumlah pihak, termasuk mantan Hakim

Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang menyarankan penghapusan syarat pendidikan bagi capres-cawapres, kurang tepat.

"Kalau saya merasa bahwa tetap harus ada. Harus tetap ada syarat (pendidikan), bahkan menurut saya harus dinaikkan," tegas Doli saat menjadi narasumber dalam podcast YouTube bertajuk "Ahmad Doli Blak-blakan Soal Pasal Selundupan Pencalonan Gibran | NGOCAK FEBBY" dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, Indonesia tengah bergerak menuju negara maju. Karena itu, ia meyakini ke depan seluruh anak Indonesia akan mengenyam pendidikan tinggi sehingga standar pendidikan

pemimpin negara tidak semestinya diturunkan.

Menurut Doli, posisi kepala negara sangat penting karena keputusan pemimpin akan menentukan nasib ratusan juta rakyat Indonesia.

"Kita ini kan ingin mencari top leader lho. Syarat-syarat yang kita buat itu supaya tersaring figur yang best of the best," tegas Doli.

"Enggak boleh kita kasih kepada orang yang sembarangan atau orang yang posisinya

di bawah orang yang akan dipimpinya," imbuhnya menegaskan.

Ia mendorong agar persyaratan pendidikan, baik yang ditempuh di dalam maupun luar negeri, diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan demi-

kian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun peraturan teknis pencalonan.

Di sisi lain, mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie justru mengusulkan agar persyaratan ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden dihapus dari undang-undang.

Usulan itu disampaikan sebagai respons terhadap putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi ijazah ini ini kan urusan administrasi pendidikan syarat mutlak untuk memimpin sebuah negara," kata Jimly kepada wartawan di kawasan MK, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026.

NASIONAL

Demi Karier Politik Kaesang, Jokowi Diprediksi Tak Ambil Alih PSI

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.41 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpeluang menolak tawaran menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) demi menjaga marwah putranya, Kaesang Pangarep, yang saat ini memimpin partai tersebut.

Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, meski memiliki peluang besar menggantikan Kaesang, Jokowi kemungkinan tetap mempertahankan posisi ketua umum untuk putranya.

Menurut Jamiluddin, Jokowi merupakan sosok yang sangat diidolakan sebagian kader PSI. Hal ini menyusul pernyataan Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron bahwa banyak kader di daerah menginginkan Jokowi menjadi ketua umum.

"Jadi, Jokowi memang sangat diidolakan oleh sebagian kader PSI. Bahkan Jokowi dianggap role model di internal PSI," kata Jamiluddin dalam keterangannya, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menilai, PSI memang membutuhkan nahkoda baru untuk mendongkrak elektabilitas partai. Sebab, selama dipimpin Kaesang, elektabilitas PSI dinilai tidak meningkat, bahkan menurun.

Penetapan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI juga disebut belum mampu memperbaiki elektoral partai. Jamiluddin menilai, dari kader yang ada saat ini, Jokowi memiliki daya tarik paling kuat untuk membesarkan PSI dan mengantarkannya ke Senayan.

Namun, mengambil alih kepemimpinan PSI dinilai berisiko menjatuhkan marwah Kaesang. Jokowi disebut tidak ingin putranya memiliki catatan politik bahwa dirinya gagal menjadi ketua umum karena digantikan sang ayah.

"Jokowi ingin kalau nantinya PSI masuk Senayan itu prestasi Kaesang, bukan dirinya," ujar Jamiluddin.

Karena itu, Jokowi diperkirakan tetap mendukung Kaesang melalui safari politik yang direncanakan berlangsung ke seluruh Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas PSI tanpa harus mengambil alih kepemimpinan partai.

Jamiluddin menilai, strategi tersebut menjadi cara Jokowi mendorong Kaesang membangun karier politiknya. Jokowi ingin mengambil posisi tut wuri handayani dalam suksesi politik putranya.

NASIONAL

Prabowo Tegaskan Dirinya Penerus Politik Jokowi: Mengutamakan Kepentingan Nasional daripada Kelompok

Oleh Redaksi · 22 Okt, 12.09 WIB

BANDA ACEH - 2 Tahun Kabinet Merah Putih, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mempertegas arah dan kompas Politik pemerintahannya di ranah domestik. Alih-alih menerapkan sistem politik konfrontatif atau menyingkirkan para rival, ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya memegang teguh warisan garis politik pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).Prabowo membeberkan alasan filosofis mengapa pemerintahannya sangat menghindari friksi politik di dalam negeri dan lebih memilih pendekatan rekonsiliasi yang merangkul banyak pihak. Menurutnya, ego sektoral dan kepentingan partai politik harus dilebur ketika berhadapan dengan urusan kelangsungan hidup negara.

"Demikian juga dalam garis politik saya dalam negeri. Saya mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok," kata Prabowo dikutip Kamis (22/10/2026).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menyadari bahwa turbulensi geopolitik dan geoekonomi yang melanda dunia saat ini tidak bisa dihadapi oleh pemerintahan yang terbelah.

Oleh karena itu, ia mengadopsi penuh taktik rekonsiliasi yang pernah diterapkan pendahulunya kepadanya usai Pemilihan Presiden 2019. Pengalaman masuk ke dalam lingkaran kekuasaan sebagai menteri telah memberikannya perspektif baru tentang pentingnya persatuan elite.

"Dari sejak awal, bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai presiden, saya masih jadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo," papar dari Prabowo.

Ia membeberkan bahwa konstelasi global yang serba tidak pasti menuntut adanya konsolidasi total dari seluruh elemen bangsa.

NASIONAL

Arif Rahman Resmi Dilantik jadi Ketum Petani NasDem, Siapkan 3 Program Prioritas

Oleh Redaksi · 22 Okt, 13.42 WIB

BANDA ACEH - Arif Rahman resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani NasDem periode 2026-2029.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Pengesahan kepengurusan yang dinakhodai Arif Rahman tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 262-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2026.

Arif Rahman didampingi tiga wakil ketua umum, yakni Ananda Tohpati, M. Habibur Rochman, dan Benny Subani. Posisi sekreta-

ris jenderal dijabat Muslim Ayub, sedangkan bendahara umum dipercayakan kepada Imam Taufik.

Adapun, Dewan Pembina diketuai Viktor Bungtilu Laiskodat dan Dewan Pakar dipimpin Syaiful Bahri.

Dalam sambutannya, Arif menegaskan Petani NasDem berkomitmen menyatukan gerakan restorasi Partai NasDem dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui program konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan.

"Di luar sana banyak yang mencoba membenturkan gerakan perubahan dengan Asta Cita. Hari ini

di hadapan Bapak (Surya Paloh), saya tegaskan tidak ada yang perlu dibenturkan. DPP Petani NasDem adalah wadah untuk menyatukan gerakan perubahan NasDem menuju Asta Cita pemerintahan Prabowo," tegas Arif.

Arif yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem itu kemudian mengumumkan tiga program strategis yang menjadi prioritas kepengurusan periode 2026-2029.

Pertama, pembangunan demplot pertanian terintegrasi seluas dua hektare di setiap provinsi. Program ini diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah, memperkuat akses

pasar, serta membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

Arif mencontohkan pengembangan kopi di Aceh, kakao di Sulawesi Barat, rumput laut di Nusa Tenggara Barat, dan padi organik di Jawa. Hasil pertanian juga akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pasar ekspor.

Kedua, pemberdayaan Kampung Nelayan Merah Putih serta pengembangan budidaya ikan lele dan nila. Petani NasDem akan mendorong penguatan fasilitas nelayan, seperti dermaga, cold storage, pabrik es, ketersediaan solar, hingga pembentukan koperasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Dalam Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Oleh Redaksi · 23 Okt, 10.05 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami keterlibatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Hal ini menyusul fakta persidangan mengenai pergeseran anggaran pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan penyidik akan mendalami kemungkinan pengembangan perkara ke lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Saat ini, penyidikan masih berfokus pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut yang menggunakan anggaran APBN.

"Sehingga nanti memang apakah ada kemudian pengembangan-

pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah gitu karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat," kata Taufik seperti dikutip, Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, fakta yang ditemukan selama penyidikan maupun yang terungkap di persidangan menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan perkara.

"Jadi setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini," ujarnya.

Terkait kemungkinan pengembangan penyidikan ke lingkungan Pemprov Sumut, termasuk yang berkaitan dengan Bobby, Taufik

menegaskan hal tersebut masih akan didalami.

"Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan," tutur Taufik.

Nama Bobby sebelumnya menjadi sorotan dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Effendy Pohan, untuk memberikan keterangan mengenai pergeseran anggaran proyek jalan senilai sekitar Rp165 miliar.

Anggaran tersebut berkaitan dengan dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni

ruas Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Sipiongot-Hutaimbaru. Dalam persidangan, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, menerangkan bahwa anggaran kedua proyek belum tercantum dalam APBD murni 2025, melainkan dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Majelis hakim menyoroti mekanisme pergeseran anggaran yang disebut dilakukan hingga enam kali melalui peraturan gubernur. Hakim ingin mengetahui dasar hukum, proses evaluasi, serta pengambilan keputusan sebelum anggaran disetujui.

Pada persidangan 1 Oktober 2025, Khamozaro menyatakan pemanggilan Bobby akan diper-timbangkan berdasarkan perkembangan fakta persidangan.

NASIONAL

395 Orang Keracunan MBG, Kepala SPPG Cirebon Dicapot

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.45 WIB



BANDA ACEH - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga 5 di Kota Cirebon, Jawa Barat, dicopot setelah investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 395 orang.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Cirebon, Yulian Septa Pratama, mengungkap pengelolaan SPPG Kalijaga 5 kepadatan memesan bahan atau makanan jadi dari mitra maupun vendor luar untuk kemudian diolah kembali. Praktik tersebut melanggar petunjuk teknis (juknis) BGN.

"Mereka memesan dari mitra, dari vendor, memesan dari vendor, kemudian diolah. Nah, itu sebenarnya sudah dilarang di juknis kami," kata Yulian.

Temuan itu diperoleh setelah tim KPPG bersama Kedeputusan Pemantauan dan Pengawasan BGN turun langsung ke lokasi. Pemeriksaan mencakup kondisi fisik dapur, manajemen pengelolaan, hingga tata kelola operasional SPPG.

Atas pelanggaran tersebut, KPPG berkoordinasi dengan BGN pusat dan menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap kepala SPPG. Namun, penanganan kasus belum berhenti di situ. BGN masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan tindak lanjut.

"Untuk saat ini, yang bersangkutan itu sudah dicopot dari Kepala SPPG. Cuma tetap akan ada tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan dan laboratoriumnya nanti," ujar Yulian.

Insiden dugaan keracunan ini tercatat menimpa 395 orang, mulai dari siswa TK dan SD, guru, hingga pegawai SPPG. Mereka mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare setelah menyantap menu sop telur puyuh.

Para korban mendapat penanganan medis di 10 rumah sakit. Pihak SPPG juga dipastikan menanggung biaya perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan.

Meski investigasi menemukan pelanggaran juknis dalam pengelolaan dapur, hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk menentukan penanganan lebih lanjut atas insiden tersebut.

NASIONAL

Dua Anak Menhaj Gus Irfan jadi Tenaga Ahli Kemenhaj, Said Didu: Menjijikkan!

Oleh Redaksi · 23 Okt, 17.36 WIB



BANDA ACEH -Beredar kabar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengangkat dua anak kandungnya sebagai tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Keduanya adalah Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz.

Informasi pengangkatan kedua anak Gus Irfan tersebut dibenarkan sumber redaksi di lingkungan internal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Polemik ini mencuat setelah beredar dokumen yang disebut sebagai lampiran Keputusan Men-

teri Haji dan Umrah Nomor 3/2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.

Dokumen tersebut memuat sembilan nama, termasuk Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz yang disebut sebagai putra Gus Irfan.

Sontak, kabar pengangkatan tenaga ahli dari lingkungan keluarga inti Gus Irfan ini menuai beragam kritik. Salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

"Memalukan dan menjijikkan!" tulis Saidu Didu merespons polemik tersebut, Jumat, 23 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Amien Rais Sebut Jokowi “Zombie Politik”, Ramal Gibran Tak Digandeng Prabowo pada 2029

Oleh Redaksi · 22 Okt, 13.36 WIB

BANDA ACEH – Tokoh Politik Amien Rais menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengalami “kematian politik” dan mengibaratkannya sebagai zombie politik. Ia juga meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan kembali menggandeng Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Amien dalam sebuah video yang diberinya judul “The Political Dead of Jokowi”. Menurut Amien, istilah itu merupakan metafora yang menggambarkan bahwa perjalanan politik Jokowi telah berakhir.

“Ini sebuah metafor yang berisi pesan bahwa karier Jokowi itu

sudah berakhir. Mau berjuang dan bekerja keras kayak apapun, mau mati-matian seperti yang dikatakan Jokowi ya boleh-boleh saja, tapi who cares?” kata Amien dalam video Youtube Amien Rais Official, Kamis (22/10/2026).

Amien juga menilai harapan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden sudah tidak realistis. Ia kemudian melontarkan kritik terhadap Jokowi dan putranya tersebut.

“Mengharapkan Gibran mundur dari kursi wakil presiden sudah tidak mungkin, yang kita hadapi oknum yang serba setengah matang ya anaknya ya bapaknya,” ujarnya.

Amien Rais Prediksi Gibran Tak Kembali Jadi Cawapres

Lebih lanjut, Amien menilai Pilpres 2029 akan menjadi titik akhir perjalanan politik Jokowi. Ia secara tegas menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo tidak akan kembali memilih Gibran sebagai calon wakil presiden.

“Kalau pikiran Jokowi normal dan waras tahun 2029 adalah stasiun terakhir perjalanan politik Jokowi. Secara kategoris saya katakan tidak mungkin Prabowo masih akan menggandeng Gibran pada 2029 besok,” kata Amien.

Ia bahkan menyebut kemungkinan tersebut sebagai sesuatu yang mustahil. Amien juga meminta Jokowi menghentikan aktivitas politik yang, menurut penilaiannya, berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Segera berhentilah mengacau keadaan, tidak usah lagi membia-yai puluhan ribu ternak, buzzer, dan manusia-manusia aji mumpung yang jumlahnya memang seabrek-abrek. Dan berhentilah mengutak-atik cara-cara terkutuk untuk menggoyahkan stabilitas nasional,” ujarnya.

Singgung Isu Ijazah Jokowi Amien kemudian mengibaratkan Jokowi sebagai zombie politik yang, menurutnya, tidak lagi memiliki daya menakutkan bagi masyarakat. Ia juga kembali menyinggung polemik keaslian ijazah Jokowi.

“Kini Jokowi bisa diibaratkan sudah jadi zombie politik, tetapi tidak menakutkan sama sekali ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

A large indoor gathering, likely a cabinet meeting, with many people seated at long tables. A large screen in the background displays the text "SIDANG KABINET PARIPURNA" and the Garuda Pancasila logo. A man in a light-colored suit is standing and addressing the group. The room is decorated with Indonesian flags and portraits of Indonesian leaders. The floor features a large blue and yellow circular pattern. In the bottom right corner, a blue banner with the word "SIDANG" is visible.

Terungkap di Persidangan, Dian Sandi Akui Belum Pernah Lihat Ijazah Asli Jokowi

Korban Keracunan MBG di Cirebon Bertambah jadi 395 Siswa, Dirawat di 10 RS

Bank Aceh

Action

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankacehdia.go.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

KPK Cari Keterangan Nusron, Kamera Istana Justru Menemukannya

Oleh Redaksi · 23 Okt, 10.27 WIB



BANDA ACEH - - Dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali terlihat menghadiri agenda pemerintahan di Istana Negara.

Di tengah sorotan tersebut, KPK menyiapkan jadwal pemanggilan lanjutan untuk meminta keterangannya dalam penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT SA dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron sedianya diperiksa sebagai saksi pada 7 dan 15 Oktober 2026. Namun, ia tidak memenuhi kedua panggilan penyidik tersebut.

Pekan lalu, Nusron diketahui bepergian ke Singapura dan Malaysia melalui Batam. Setelah

kembali ke Indonesia, ia terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Rabu (21/10/2026).

Kehadiran Nusron luput dari pantauan awak media yang berjaga di pintu masuk kawasan Istana dari arah Gedung Setneg, Jalan Veteran III. Keberadaannya baru diketahui melalui siaran langsung sidang kabinet di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam tayangan tersebut, Nusron tampak mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Ia duduk di belakang Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, berdekatan dengan sejumlah pejabat, termasuk Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto serta Kepala Bappenas Rachmat Pam-budy.

Namun, setelah sidang kabinet berakhir, keberadaan Nusron kembali tidak terpantau. Awak media tidak melihatnya keluar dari Istana.

KPK Siapkan Pemanggilan Lanjutan

Di tengah belum terpenuhinya dua panggilan pemeriksaan, KPK memastikan penyidik akan mengatur jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Nusron. Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum memastikan apakah surat panggilan berikutnya telah dikirimkan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron.

“Nanti kami cek. Karena memang penyidik juga secepatnya akan atur jadwalnya untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” kata

Budi kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

KPK berharap Nusron memenuhi panggilan berikutnya dan memberikan keterangan yang diperlukan untuk membantu pengungkapan perkara.

“Kami tentu berharap nanti NW kooperatif hadir dalam pemanggilan dan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik guna membantu dalam pengungkapan perkara ini,” ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Nusron dinilai penting dalam rangkaian penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT SA dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Namun, hingga kini KPK belum mengungkapkan materi spesifik yang akan didalami dari keterangannya.

NASIONAL

Menteri Jangan Bikin Gaduh Saat Kepercayaan ke Pemerintah Pulih

Oleh Redaksi · 23 Okt, 10.11 WIB



BANDA ACEH -Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai menunjukkan pemulihan kepercayaan investor terhadap pemerintah harus dijaga dengan konsistensi kebijakan dan komunikasi pejabat publik.

Pengamat Politik Hendri Satrio mengingatkan, pernyataan pejabat yang tidak terkendali dan sikap antikritik justru bisa merusak momentum positif tersebut.

“Pengalaman kita, yang sering bikin kepercayaan turun itu bukan pihak luar, tapi pernyataan pejabat kita sendiri. Satu kalimat asal bicara bisa menghapus kerja berminggu-minggu,” kata Hensa, Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menyarankan para menteri yang kerap membuat kegaduhan melalui pernyataan publik agar menahan diri. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan komunikasi pejabat tidak justru mengganggu kepercayaan yang mulai pulih.

“Jadi kalau ada menteri yang hobi bikin gaduh, sebaiknya puasa bicara dulu biar kepercayaan yang baru balik ini tidak kabur lagi,” tutur Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu.

Akademisi Universitas Paramadina itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan sinyal positif di pasar saham sebagai alasan untuk mengabaikan kritik. Baginya, kemampuan menerima kritik merupakan salah satu hal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Menurut saya pemerintah yang dipercaya itu pemerintah yang tahan dikritik, bukan yang sibuk membalas kritik. Stabil itu bukan berarti tidak ada suara yang berbeda. Stabil itu artinya pemerintah tetap tenang, tetap bekerja, dan tidak gampang baper setiap kali dikritik,” tegasnya.

Hensa berharap momentum positif yang mulai terbentuk dapat dirawat melalui kerja nyata dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

“Momentumnya ada, tinggal pemerintah mau merawatnya atau malah merusaknya sendiri. Saya berharap pemerintah memilih yang pertama. Semoga sinyal baik ini bertahan. Yang dibutuhkan sekarang bukan tepuk tangan, tapi konsistensi,” pungkasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id



Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Unggahan Lama Gibran “Saya Gak Punya Malu” Kembali Viral di Tengah Desakan Pemakzulan

Oleh Redaksi · 22 Okt, 12.24 WIB

BANDA ACEH — Sebuah unggahan lama di akun X (sebelumnya Twitter) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali beredar luas di media sosial.

Unggahan tersebut memuat kalimat “Awokwowkwkwowk tapi saya gak punya malu pak” yang kini dikaitkan oleh sejumlah pihak dengan desakan pemakzulan terhadapnya terkait temuan Mahkamah Konstitusi (MK) soal bukti ijazah setara SMA.

Unggahan itu berasal dari akun @gibran_tweet pada 28 Januari 2023. Saat itu, Gibran membalas komentar netizen yang menyebut dirinya “harusnya malu” karena pemberitaan media asing dinilai bukan soal prestasi. Gibran menjawab dengan nada santai dan

humor khasnya: “Awokwowkwkwowk tapi saya gak punya malu pak.”

Unggahan tersebut mendapatkan lebih dari seribu likes dan ratusan repost pada masanya.

Awokwowkwkwowk tapi saya gak punya malu pak

— Gibran Rakabuming (@gibran_tweet) January 28, 2023

Kini, di tengah kontroversi ijazah yang memanas setelah putusan MK, unggahan lama itu kembali disebarluaskan oleh warganet dan Pengamat Politik.

Banyak yang mengaitkannya dengan pernyataan Gibran baru-baru ini yang menegaskan bahwa ia tidak mungkin bisa kuliah hingga S1 di Singapura jika tidak lulus SMA.

Sebaliknya, pihak yang mendorong pemakzulan menilai sikap tersebut mencerminkan “ketidakmaluan” di tengah temuan lembaga peradilan konstitusi.

Pada 6 Oktober 2026, MK memutuskan tidak menerima permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024.

Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan setara SMA dari luar negeri.

Temuan ini menjadi dasar sejumlah pihak, termasuk pengugat seperti Denny Indrayana dan Ansufri Idrus Sambo, untuk men-

dorong Gibran mundur atau diusulkan dimakzulkan oleh DPR.

Roy Suryo, misalnya, secara terbuka menyarankan Gibran untuk “malu” dan mundur jika tidak ingin menghadapi tekanan lebih besar.

Beberapa fraksi di DPR juga dikabarkan membuka peluang mendukung wacana Hak Angket atau usulan pemakzulan, meskipun prosesnya harus melalui mekanisme konstitusional yang panjang (usulan DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR). Di sisi lain, pihak pendukung Gibran dan sejumlah partai koalisi menilai putusan MK telah final dan tidak secara otomatis membuka jalan pemakzulan.

NASIONAL

Dosen IPB Bongkar Kesaksian Jujur Alumni Orchard Park Singapura Soal Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 22 Okt, 11.58 WIB



BANDA ACEH - Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menuai perhatian setelah dosen IPB University, Meilanie Buitenzorgy, membagikan unggahan yang menyinggung pengalaman sejumlah pengguna media sosial yang mengaku pernah bersekolah di Orchard Park Secondary School, Singapura.Melalui akun media sosial pribadinya, Meilanie menyoroti pengakuan para pengguna yang merasa tidak pernah mengenal Gibran, meskipun mengaku bersekolah di tempat yang sama pada periode yang diseb-

ut berdekatan dengan masa pendidikannya.

“Waini. Anak Orchard Park Sec School Singapore angkatan sekitaran Gibby mulai pada celingak celinguk, ‘woyyy waktu sekolah dulu kok gua ga pernah ketemu ni Wapres tetangga’? Dan komen2 roasting gimanaa gitu. Duh. Gw sih malu. Gatau mas Anang,” tulis Meilanie.

Unggahan tersebut turut menampilkan tangkapan layar percakapan di media sosial yang memuat cerita pribadi sejumlah pengguna tentang pengalaman mereka selama menempuh pendidikan di Orchard Park ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id



Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dian Sandi Sebut Ijazah Asli Jokowi dari Cerita Orang Lain

Oleh Redaksi · 23 Okt, 08.24 WIB



BANDA ACEH - Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan kader PSI Dian Sandi Utama dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim), Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam kesaksiannya, Dian mengaku bahwa foto ijazah ijazah mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang pernah diunggahnya diperoleh dari akun media sosial X bernama Hyperpoison.

Dian tegas mengakui bahwa foto tersebut sebagai ijazah asli Jokowi. Namun, ketika JPU mempertanyakan dasar keyakinannya, Dian menjelaskan bahwa penilaiannya turut didasarkan pada cerita seseorang yang disebutnya sebagai teman kuliah Jokowi.

Menurut Dian, orang tersebut adalah Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dian mengaku mengenal Andi ketika dirinya bekerja sebagai staf khusus Gubernur NTB pada 2018. Dian mengatakan, Andi pernah bercerita mengenai pengalamannya berkuliah bersama Jokowi.

Ia juga mengaku menerima sejumlah foto terkait masa kuliah Jokowi, termasuk foto wisuda, dari Andi pada 2022.

Dian menyatakan bahwa reputasi dan integritas Andi menjadi salah satu alasan dirinya mempercayai informasi tersebut.

Ia juga merujuk pada keterangan UGM bahwa Jokowi memang pernah menempuh pendidikan di universitas tersebut.

Usai foto ijazah tersebut bikin geger publik, Dian mengaku berinisiatif

menemui Jokowi di Solo. Kedinginannya diniatkan untuk menyampaikan permintaan maaf mengenai unggahan di akun X-nya, @DianSandiU.

"Pada waktu Anda datang ke kediamannya Pak Jokowi, Anda itu diundang apa inisiatif Saudara sendiri," tanya kuasa hukum Dokter Tifa.

"Saya inisiatif saya sendiri," jawab Dian.

Kuasa hukum Dokter Tifa kemudian mempertanyakan alasan Dian meminta maaf kepada Jokowi.

Ia mengaku merasa bersalah karena unggahannya tersebut membuat pemberitaan menjadi ramai.

"Anda merasa bersalah atau gimana kok meminta maaf," kata tim hukum Dokter Tifa.

"Saya merasa bersalah. Karena saat itu gara-gara postingan itu jadi ramai pemberitaan," kata Dian.

Dian juga menceritakan asal usul mengunggah foto ijazah Jokowi pada akun X pribadinya, @DianSandiU. Awalnya dia membuat utasan mengenai perjalanan perkuliahan Jokowi.

Dari postingan yang sekadar tulisan itu, ternyata dikomentari oleh salah satu akun anonim bernama Hyperpoison.

Komentar akun anonim itu mengunggah dokumen foto ijazah Jokowi.

"Dia berkomentar di situ lalu saya mendownload gambar tersebut atau ijazah tersebut dan saya posting ulang," sambungnya.

NASIONAL

Aliansi Ulama Demo di DPRD Jatim, Dorong Wacana Pemakzulan Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 23 Okt, 08.49 WIB



Ratusan ulama, kiai, habib, serta tokoh masyarakat Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Kamis (22/10/2026).

BANDA ACEH - Ratusan ulama, kiai, habib, serta tokoh masyarakat Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Kamis (22/10/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap dengan menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Massa menafsirkan putusan MK tersebut sebagai landasan untuk mempertanyakan pemenuhan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Atas dasar penafsiran hukum tersebut, massa mendesak adanya evaluasi mendalam terkait kelayakan jabatan Wakil Presiden, bahkan mendorong wacana proses pemakzulan (impeachment) dengan merujuk pada Pasal 7A UUD 1945.

"Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi dan penafsiran konstitusi terkait pemenuhan syarat pendidikan. Kami menilai proses hukum dan administratif harus ditegakkan secara objektif," kata Ketua Aliansi Ulama Jawa Timur, Rahmat Mahmudi.

Aksi demonstrasi tersebut diterima langsung oleh wakil rakyat di

Gedung Indrapura. Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik, menggarisbawahi pentingnya menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat serta menyikapi dinamika penyampaian pendapat di muka umum secara bijak.

"Kami menghargai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam konteks pembelaan konstitusi. Namun, seluruh proses harus tetap menjaga marwah lembaga legislatif serta berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Lilik.

Massa menyatakan bakal melanjutkan dengan membawa tuntutan dan aspirasi tersebut ke DPR RI di Jakarta, yang dinilai memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan penetapan maupun pemakzulan pejabat negara.

Untuk diketahui, desakan pemakzulan yang disuarakan para demonstran saat ini masih merupakan tuntutan Politik dan penafsiran hukum parsial dari kelompok masyarakat.

Sesuai ketentuan UUD 1945, mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus melalui proses pembuktian hukum formal yang ketat di DPR, MK, hingga MPR, serta tidak dapat terjadi secara otomatis hanya berlandaskan desakan massa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Dian Sandi Ternyata Dapat Foto Ijazah Jokowi dari Akun Ini, Diunduh lalu Diunggah Ulang

Oleh Redaksi · 22 Okt, 13.31 WIB

JAKARTA - Dian Sandi Utama mengungkap asal-usul foto ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang diunggahnya melalui akun X.

Foto tersebut awalnya ditemukan setelah sebuah akun bernama Hyperpoison memberikan komentar pada utas yang dibuatnya membahas perjalanan kuliah Jokowi.

Keterangan itu disampaikan Dian saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026).

Di hadapan jaksa penuntut umum (JPU), Dian menjelaskan dia semula membuat utas menge-

nai perjalanan pendidikan Jokowi sebelum menemukan foto ijazah yang kemudian diunggah ulang ke akun X miliknya.

Dian mengatakan, komentar dari akun Hyperpoison menjadi titik awal dirinya memperoleh gambar tersebut.

Dia kemudian mengunduh foto yang dibagikan akun itu dan mengunggahnya kembali.

"Saya membuat sebuah utas yang menceritakan tentang perjalanan kuliahnya Pak Jokowi. Lalu kemudian setelah itu ada akun Hyperpoison namanya, berkomentar di dalam di utas itu," ujarnya.

Setelah mengunduh gambar dari komentar tersebut, Dian mengaku membandingkannya dengan

sejumlah informasi lain mengenai ijazah Jokowi.

Dia menyebut menemukan kemiripan dengan gambar yang pernah ditampilkan dalam acara reuni Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2022.

"Dia berkomentar di situ lalu saya mendownload gambar tersebut atau ijazah tersebut dan saya posting ulang," katanya.

Dian menjelaskan, pencocokan itu dilakukan setelah dirinya mendapatkan gambar dari akun Hyperpoison.

Menurut dia, hasil pencocokan tersebut menunjukkan gambar yang sama dengan yang pernah dipublikasikan dalam acara reuni UGM.

"Lalu saya mencocokkan dengan beberapa informasi-informasi terkait tentang ijazah ini dan pada saat saya mencocokkan itu, saya menemukan persis sama dengan yang pernah terpublikasi di acara reuni UGM pada tahun 2022,"

Dalam persidangan, JPU juga menyinggung unggahan Dian yang memuat keterangan mengenai foto ijazah tersebut.

Jaksa membacakan caption yang menjelaskan bahwa Dian mengunggah gambar yang disebutnya sebagai ijazah asli Jokowi untuk menanggapi polemik foto-kopi ijazah.

"Mohon izin, mungkin barang buktinya terkait dengan akun X-nya atas nama Dian Sandi.

HIBURAN

Guru Gembul Sebut Ustadz Adi Hidayat sebagai “Setan yang Bisu” di Konten Terbaru

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.30 WIB

BANDA ACEH - Konten kreator dan YouTuber Guru Gembul kembali menuai sorotan setelah mengunggah video terbarunya yang berjudul Eps 1080 | PERBUDAKAN DALAM ISLAM. USTD ADI HIDAYAT JADI SETAN BISU.

Video yang diunggah pada 21 Oktober 2026 di kanal YouTube “guru gembul” (dengan lebih dari 1,8 juta subscriber) itu sudah ditonton ratusan ribu kali dalam waktu singkat

Dalam video berdurasi sekitar 22 menit tersebut, Guru Gembul membahas isu-isu yang ia sebut sebagai bentuk “perbudakan” atau eksploitasi di sebagian pesantren dan lingkungan keagamaan tertentu.

Ia menampilkan cuplikan ceramah seorang tokoh yang dianggapnya bermasalah—berisi candaan soal uang, wanita, dan santri putri—lalu mengaitkannya dengan

sistem pendidikan pesantren yang menurutnya sering kali tidak mengajarkan ilmu agama yang murni, melainkan praktik-praktik yang ia nilai menyimpang, seperti wirid-wirid tertentu, pengkultusan makam, hingga praktik meminta-minta.

Bagian paling kontroversial adalah penamaan Ustadz Adi Hidayat (UAH) sebagai “setan yang bisu”.

Istilah ini merujuk pada ungkapan klasik dalam tradisi Islam (*syaitan akhras* atau setan bisu), yaitu orang yang mengetahui kebenaran dan kemungkinan, tetapi memilih diam dan tidak bersuara untuk meluruskannya.

Guru Gembul menuding sejumlah ulama terkenal, termasuk UAH, enggan atau tidak berani mengkritik secara terbuka berbagai penyimpangan yang terjadi di sebagian lembaga pendidikan Islam dan di kalangan tokoh ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Oleh Redaksi · 23 Okt, 08.43 WIB



Kabinet Merah Putih. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kinerja para menteri Kabinet Merah Putih perlu dievaluasi menyusul berulangnya persoalan mendasar di masyarakat.

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi karena memiliki pola yang bisa diprediksi.

Ia menyoroti tanggung jawab pejabat berwenang, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam mengatasi persoalan di sektor energi.

"Untuk musibah non-alamiah seperti merosotnya nilai tukar Rupiah, anjloknya IHSG di Bursa Efek Indonesia, hingga antrean BBM di SPBU, siklusnya sudah dapat diperkirakan. Mekanisme dan sistem yang ketat sudah ada.

Jika masalah terus berulang, ini murni faktor human error," ujar Defiyan dalam keterangannya, Jumat, 23 Oktober 2026.

Defiyan juga menyoroti kelemahan koordinasi dalam penanganan bencana alamian seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung berapi, hingga banjir bandang.

Menurutnya, kementerian terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, serta Kementerian Dalam Negeri, seharusnya sudah memiliki peta jalan (road map) peringatan dini dan mitigasi risiko yang matang.

Menurutnya, kesalahan dan kelalaian pejabat berwenang tidak seharusnya dilimpahkan kepada bawahan.

Persoalan yang terus berulang juga menunjukkan belum optimalnya pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya.

Defiyan menilai kondisi tersebut dapat membuat para pembantu Presiden justru menjadi beban Politik maupun ekonomi bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Karena itu, ia mendorong Presiden mengambil langkah tegas terhadap menteri dan pejabat yang dinilai tidak mampu mengantisipasi persoalan mendasar.

"Publik tentu bertanya bagaimana cara Presiden mengevaluasi para pembantunya yang justru menjadi sumber masalah. The floor is yours, Mr. President. Namun, publik juga terus mengamati dan menilai hingga 2029 mendatang," pungkasnya.

EKONOMI

Prabowo Akui Pemerataan Ekonomi Tak Bisa Instan: Kita Tak Punya Tongkat Nabi Sulaiman

Oleh Redaksi · 22 Okt, 19.00 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto mengakui perbaikan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menyebut pemerintah tidak memiliki tongkat ajaib seperti tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman untuk mengubah kondisi ekonomi dalam waktu singkat. "Peralihan ini, perbaikan ini, tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi

Sulaiman. Tapi kita sudah buktikan, dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan," ujarnya, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah perlu berani mengevaluasi arah kebijakan ekonomi agar pengelolaan kekayaan nasional lebih sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut dia, selama puluhan tahun kekayaan Indonesia mengalami kebocoran, sementara manfaat ekonomi dinilai belum dinikmati secara merata oleh masyarakat.

"Sekarang, ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen di atas. Inilah upaya, saudara-saudara," katanya.

Prabowo juga menilai filosofi ekonomi yang berjalan selama ini perlu dikoreksi karena dianggap menyimpang dari amanat konstitusi.

NASIONAL

Soal Hasyim Munafik, Doli Kurnia: Dipecat KPU Kok Malah jadi Komisaris?

Oleh Redaksi · 23 Okt, 13.37 WIB



BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung angkat bicara perihal tuduhan dari mantan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Pasalnya, Hasyim menuding Doli Kurnia bersikap munafik dan lupa ingatan.

Doli Kurnia pun menepis tuduhan tersebut. Ia bahkan mengungkit rekam jejak Hasyim yang kelam selama menjadi Komisiner KPU.

"Dia menuduh saya munafik. Sebetulnya saya bilang, dia itu

sedang menjelaskan dan mengisahkan tentang dirinya sendiri," ungkapnya, saat menjadi narasumber dalam sebuah podcast di YouTube bertajuk "Ahmad Doli Blak-blakan Soal Pasal Selundupan Pencalonan Gibran | NGOCAK FEBBY" dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Doli pun mengingatkan memori publik bahwa Hasyim telah dua kali tersandung masalah etik berat hingga berujung pada pemecatan tidak hormat.

"Dia lupa pernah bermasalah dan dipecat. Karena apa? Ya

karena kemunafikannya sendiri," tegas Doli.

Lebih jauh, Doli pun merasa sangat heran dengan sistem bernegara yang terjadi saat ini. Seseorang yang jelas-jeles diberhentikan secara tidak hormat, justru mendapat "hadiah" jabatan mentereng.

"Kita heran, kenapa ada orang yang bermasalah dan diberhentikan dengan tidak hormat, tapi malah dikasih tempat terhormat sebagai komisaris? Kan aneh," pungkasnya.

NASIONAL

Nasib Gibran Ditentukan Usai Masa Reses DPR

Oleh Redaksi · 23 Okt, 08.20 WIB



BANDA ACEH - Pembahasan soal nasib Politik Wapres Gibran Rakabuming Raka berpeluang ditentukan usai DPR menjalani masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada 9 November 2026.

Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Jumat 23 Oktober 2026.

"Perkembangan sikap DPR setelah masa reses perlu dicermati untuk mengetahui apakah persoalan tersebut akan berlanjut menjadi agenda politik dan pembahasan kelembagaan," kata Amir.

Amir juga menyinggung kemungkinan komunikasi antara PDIP, PKS, dan kekuatan politik lainnya.

"Kalau ada komunikasi antarpihak mengenai persoalan Gibran, kita lihat bagaimana perkembangannya setelah DPR kembali bekerja," kata Amir.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, partainya mulai menjajaki komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia ber-

harap komunikasi tersebut membuahkan hasil.

Mardani mengatakan, masyarakat di akar rumput memandang keputusan MK terkait ijazah Gibran telah memiliki landasan hukum yang kuat. PKS berupaya menjembatani keinginan masyarakat agar putusan tersebut diamini DPR.

"Posisi sekarang kita sedang berkomunikasi dengan beberapa partai. Mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat," kata Mardani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ANEKA BERITA

11 BERITA

IN-DEPTH

2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Capaian dan Tantangan

Oleh Redaksi · 23 Okt, 04.00 WIB



Presiden Republik Indonesia. FOTO/AI for HAI.

Memasuki tahun ketiga, pemerintah menghadapi tantangan menerjemahkan program prioritas menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga disiplin fiskal, kualitas demokrasi, dan kepercayaan investor.

UA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan Indonesia.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan ini menawarkan agenda besar: memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, memasuki tahun ketiga, pertanyaan yang semakin relevan

bukan hanya seberapa besar program pemerintah dijalankan, melainkan sejauh mana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan program sosial, kondisi lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai keberhasilan dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.

Sejumlah media nasional dan internasional menyoroti dua sisi dari periode ini: ambisi pemerintah dalam memperluas pembangunan dan besarnya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Pertumbuhan ekonomi belum otomatis meningkatkan kesejahteraan

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan The

Jakarta Post pada 20 Oktober 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan 5,45 persen pada semester pertama 2026.

Angka tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global, tetapi belum serta-merta menjawab persoalan pendapatan rumah tangga dan kesempatan kerja berkualitas.

Dalam laporan yang sama, analisis yang diwawancarai The Jakarta Post menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya pekerjaan dengan upah yang memadai.

Stabilitas indikator makroekonomi akan lebih bermakna apabila masyarakat juga merasakan perbaikan daya beli dan kepastian penghasilan.

Bagi pemerintah, tantangannya adalah memperluas sumber per-

tumbuhan agar tidak hanya bertumpu pada belanja negara.

Investasi swasta, produktivitas industri, penguatan usaha mikro dan kecil, serta penciptaan lapangan kerja formal akan menentukan apakah pertumbuhan dapat bertahan dalam jangka panjang. ((The Jakarta Post, “Economy strong on paper, but people struggling”))

Makan Bergizi Gratis dan perluasan program sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda unggulan pemerintahan Prabowo.

Program ini diarahkan untuk membantu pemenuhan gizi anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi di tingkat lokal melalui pengadaan bahan pangan dan operasional dapur.

KOMUNITAS

Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat Salurkan Santunan Rp20 Juta untuk 12 Anak Yatim

Oleh Hamdani · 23 Okt, 21.54 WIB



Ketua Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat, Drs. Tgk. H. M. Aji Adam menyerahkan santunan periode III tahun 2026 kepada 12 anak yatim dengan total dana Rp20 juta di

ACEH BESAR – Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, menyalurkan santunan kepada 12 anak yatim dengan total dana sebesar Rp20 juta, Kamis (22/10/2026). Penyaluran tersebut merupakan santunan periode III tahun 2026.

Ketua Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat, Drs. Tgk. H. M. Aji Adam, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyaluran santunan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk membantu anak-anak yatim sekaligus memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat kembali menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim untuk periode III tahun 2026, dengan total dana sebesar Rp20 juta kepada 12 anak yatim. Kami berharap santunan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka serta menjadi wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial kita bersama,” ujar Aji Adam.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dermawan yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk mendukung

penyaluran santunan tersebut. Menurutnya, partisipasi para dermawan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan sosial bagi anak-anak yatim di Gampong Tanjong Seulamat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dermawan yang telah berkontribusi. Semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah, mendapat rida Allah SWT, serta dibalas dengan keberkahan dan kelapangan rezeki. Amin ya Rabbal ‘alamin,” tambahnya.

Penyaluran santunan diberikan kepada 12 anak yatim tersebut dengan besaran masing-masing Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Tgk H.M. Aji Adam berharap kegiatan santunan tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi penguat semangat kebersamaan, kepedulian, serta ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Penyaluran santunan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Baitul Mal Gampong Tanjong Seulamat dalam memperhatikan kesejahteraan anak yatim melalui pengelolaan dan penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.[]

EKONOMI

Waspada Singapura, RI Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Oleh Redaksi · 22 Okt, 16.24 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendadak bilang, bahwa Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas ke negara tetangga. Bahlil mengatakan, wacana ini dengan mempertimbangkan isu ketahanan energi nasional, di tengah kondisi dinamika geopolitik dunia yang masih panas.

Ini pun sesuai dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto di mana Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus bertahan (survival). “Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian

mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival,” ungkap Bahlil saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” tandasnya.

Sebelumnya memang, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus bertahan (survival). Penekanan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Relawan Meninggal Sesak Napas Saat Padamkan Karhutla di Kalimantan

Oleh Redaksi · 22 Okt, 16.02 WIB

BANDA ACEH - Seorang relawan pemadam kebakaran (damkar), Nordin (51), meninggal dunia saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Simpang Empat Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2026). Sebelum meninggal, pria yang akrab disapa Udin itu sempat mengeluhkan nyeri dada ketika berada di bagian depan lokasi kebakaran. Ia juga mengalami sesak napas di tengah kepulan asap tebal.

Rekan-rekannya segera membawa Udin menjauh dari titik api dan memberikan bantuan oksigen.

Namun, kondisinya terus memburuk hingga kehilangan kesadaran sebelum mendapat penanganan medis di Klinik Utama Setara Handil Bakti.

Kepala UPTD Klinik Utama Setara Handil Bakti, dr Amalia Dewi, mengatakan Udin tiba di klinik tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Rekan sesama relawan, Iskandar, mengatakan Udin mengeluhkan sakit dada ketika sedang membantu memadamkan kebakaran di bagian depan lokasi.

“Pas lagi memadamkan di depan, beliau bilang dadanya sakit. Kami bawa mundur. Memang

sempat tebal asap tadi di sini,” ungkap Iskandar dikutip dari Banjarmasin Post, Rabu (21/10/2026).

Menurut Iskandar, saat itu terdapat tiga unit relawan yang berada di kawasan belakang Kantor Kecamatan Alalak. Setelah Udin mengeluhkan sakit dada, rekan-rekannya segera membawanya menjauh dari lokasi kebakaran.

Udin sempat mendapatkan bantuan oksigen menggunakan Oxycan. Namun, ia masih mengalami kesulitan bernapas.

Karena ambulans belum tiba, rekan-rekannya berupaya membawa Udin menggunakan mobil Barisan Pemadam Kebakaran

(BPK). Saat berada di dalam mobil tersebut, Udin kehilangan kesadaran.

Tak lama kemudian, ambulans tiba dan Udin dibawa ke Klinik Utama Setara Handil Bakti untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong.

Aziz Fadillah Ramadhana, rekan relawan yang turut mengantarkan korban, mengatakan pihak medis menyatakan Udin meninggal dunia setelah mendapatkan pertolongan.

“Jadi, berdasarkan informasi dari pihak medis, beliau sudah dinyatakan meninggal dunia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



KOMUNITAS

Muhammad Saman Kembalikan Berkas Pendaftaran Balon Ketua PWI Aceh: Melanjutkan yang Baik, Memperbaiki yang Kurang

Oleh Redaksi · 23 Okt, 21.00 WIB



Bakal calon Ketua PWI Aceh Muhammad Saman didampingi tim pemenangan mengembalikan berkas pendaftaran kepada Panitia SC Konferprov XIII PWI Aceh, Jum'at sore (23/10). FOTO/Dok. Istimewa.

BANDA ACEH – Bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031, Muhammad Saman, resmi mengembalikan berkas pendaftaran pencalonannya kepada Steering Committee (SC) Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh, Jum'at (23/10/2026) sore.

Penyerahan berkas berlangsung di Gedung PWI Aceh, kawasan Simpang Lima, Banda Aceh, di tengah guyuran hujan lebat. Namun, kondisi cuaca tersebut tidak menghalangi Muhammad Saman bersama tim pemenangan untuk menuntaskan tahapan administrasi pencalonan yang menjadi bagian penting dari proses pemilihan kepemimpinan PWI Aceh untuk lima tahun mendatang.

Dalam pengembalian berkas tersebut, Muhammad Saman menyerahkan dokumen persyaratan pen-

calonan, termasuk dukungan anggota sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah pemilih yang menjadi acuan panitia. Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sekitar 320 orang, dukungan minimal yang dipersyaratkan berjumlah 32 anggota biasa PWI Aceh.

Kedatangan Muhammad Saman diterima langsung Ketua SC Konferprov XIII PWI Aceh, Azwani Awi yang akrab disapa Popon, didampingi Sekretaris SC Iranda Novandi, anggota SC Imran Joni selaku Pokja Verifikasi Calon, serta Azhari Usman dari Pokja Qorum. Turut hadir Ketua Panitia OC Konferprov XIII PWI Aceh Nazar Ahadi.

Muhammad Saman hadir bersama sejumlah pimpinan media dan tokoh pers Aceh, di antaranya Aldin NL dari Waspada Aceh, Sulaiman selaku Pemimpin

Redaksi Harian Rakyat Aceh, serta HT Anwar Ibrahim, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh.

Sejumlah anggota tim pemenangan Saman juga turut mendampingi proses penyerahan berkas tersebut.

Pengembalian berkas ini menjadi langkah lanjutan setelah Saman mengambil formulir pendaftaran pada hari pertama penjurian bakal calon, Senin (5/10/2026). Dengan penyerahan dokumen tersebut, ia menegaskan keseriusannya mengikuti seluruh tahapan pemilihan Ketua PWI Aceh periode 2026–2031.

Usung Gagasan Melanjutkan yang Baik, Memperbaiki yang Kurang

Dalam pencalonannya, Muhammad Saman mengusung gagasan “Melanjutkan yang Baik, Mem-

perbaiki yang Kurang” sebagai arah kepemimpinan PWI Aceh periode 2026–2031.

Gagasan tersebut menempatkan kesinambungan program yang telah berjalan baik sebagai salah satu pijakan, sekaligus membuka ruang evaluasi dan pembenahan terhadap hal-hal yang dinilai masih perlu ditingkatkan dalam organisasi profesi wartawan tersebut.

Melalui visi dan misi yang ditawarkan, Saman ingin mewujudkan PWI Aceh yang bersih, amanah, transparan, profesional, dan independen. Organisasi wartawan, menurut arah program yang disusunnya, tidak cukup hanya menjadi wadah berkumpulnya para jurnalis, tetapi juga harus mampu memperjuangkan kesejahteraan anggota, meningkatkan ...

OTOMOTIF

KPK Sita Mobil BMW Milik Orang Kepercayaan Eks Kepala BNPB, Total Empat Mobil Diamankan

Oleh Redaksi · 23 Okt, 20.09 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset berupa satu unit mobil BMW dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mobil tersebut disita dari tersangka Richard Erlangga, tenaga ahli yang disebut sebagai orang kepercayaan mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, pada Jumat (23/10).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan barang bukti dalam perkara yang menjerat Richard sebagai tersangka.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB, pada hari ini, Jumat (23/10), penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil BMW dari tersangka Saudara RIC (Richard Erlangga)," kata Budi Prasetyo.

Dengan penyitaan terbaru tersebut, KPK telah mengamankan empat unit mobil yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dana bencana BNPB.

Sebelumnya, penyidik menyita tiga mobil saat menggeledah rumah Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya di Jakarta.

Ketiga kendaraan yang lebih dahulu disita terdiri atas satu mobil listrik AION, BYD Atto 3 Superior, dan satu unit BMW. Penyitaan dilakukan ketika penyidi-

dik menelusuri barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Budi menambahkan, tiga kendaraan itu diamankan dalam rangkaian penggeledahan yang menasar rumah tersangka Bima Setiawan dan pihak-pihak terkait.

"Tiga unit sebelumnya diamankan dan disita saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Saudara BMS (Bima Setiawan) dan pihak terkait, yang berlokasi di wilayah Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut, tiga mobil yang disita yaitu satu merk AION, BYD/Atto 3 Superior, dan BMW," jelasnya.

KPK akan menelaah hasil penggeledahan serta barang-barang yang telah disita untuk menentukan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diurus.

Analisis tersebut juga diperlukan guna memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB.

Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10). Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan untuk diperiksa terkait dugaan korupsi penggunaan DSP di lingkungan BNPB.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni, Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB; Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Kecelakaan Dipicu Kabut Asap: Mobil Tabrak Bundaran Pemotor Pilih Jatuhkan Diri

Oleh Redaksi · 22 Okt, 16.10 WIB

BANDA ACEH - Insiden kecelakaan hari ini di Kota Sampit, mobil Toyota Rush menabrak Bundaran Titik Nol Kilometer Sampit, Kamis (22/10/2026) dini hari.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas itu tepatnya terjadi di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah sekitar pukul 03.00 WIB.

Kondisi Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),

Kalimantan Tengah diselubungi kabut asap pekat.

Jarak pandang yang sangat terbatas diduga menjadi pemicu kecelakaan tunggal mobil Toyota Rush tersebut.

Di sisi lain, pengendara motor bernama Didi bahkan nyaris tertabrak mobil Toyota Rush yang kemudian menghantam bundaran Titik Nol Kilometer Sampit, Kamis (22/10/2026) dini hari.

Ia akhirnya memilih menjatuhkan diri dari sepeda motor untuk menghindari kemungkinan tertabrak kendaraan tersebut.

Didi mengaku terkejut ketika mobil tersebut berada di dekatnya.

Didi bercerita saat kejadian kabut asap masih cukup tebal. Meski demikian, ia tidak bisa memastikan apakah kondisi tersebut menjadi penyebab mobil mengalami kecelakaan.

"Kalau kabut asap itu masih tebal, Bang. Mungkin kejadian ini karena posisi kita memang sedang berkabut," ujar Didi dikutip HARIANACEH.co.id dari Tribunkalteng.

Didi mengatakan, posisi mobil berada di depannya sebelum kecelakaan terjadi. Ia kemudian terkejut ketika mobil berada sangat dekat dengannya.

INTERNASIONAL

Parlemen Malaysia Tegur Prabowo Pakai Bahasa Jawa Kasar soal Kabut Asap

Oleh Redaksi · 22 Okt, 15.05 WIB

BANDA ACEH — Anggota parlemen Malaysia Kalam Salan menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Menariknya, politikus oposisi itu memilih menggunakan bahasa Jawa untuk menyampaikan seruannya kepada kepala negara Indonesia.Kalam, anggota parlemen dari daerah pemilihan Sabak Bernam, menyampaikan pesan ter-

sebut saat membahas Rancangan Anggaran Belanja Malaysia 2027 di Dewan Rakyat, Rabu (21/10/2026). Ia meminta Prabowo mengambil tindakan segera untuk memadamkan kebakaran dan mencegah persoalan kabut asap kembali berulang setiap tahun.

“Pak Prabowo yang saya hormati, mohon segera mengambil tindakan untuk memadamkan kebakaran dan menghentikan pembakaran agar masalah ini ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Sebuah Kapal yang Kandas Sedang Meracuni Laut Bersama ASEAN

Oleh Redaksi · 23 Okt, 16.30 WIB



Dari Selat Malaka hingga Laut China Selatan, perairan ini menopang mata pencaharian, perdagangan, dan memori peradaban seluruh ASEAN. Namun sebuah kapal perang tua peninggalan Perang Dunia II yang kandas di Terumbu Ayungin selama lebih dari sepelempat abad, dengan drum minyak, botol plastik, dan tali bekas yang terus mengapung di perairan sekitarnya, merupakan kerusakan ekologis yang lambat namun berkepanjangan di perairan bersama kita. Berdasarkan data pemantauan jangka panjang, kapal yang kandas bernama BRP Sierra Madre itu rata-rata membuang sekitar 5.000 ton air limbah domestik dan menumpahkan lebih

dari 300 ton sampah setiap tahun. Zat pencemar, yang terbawa arus dan pasang surut, telah membentuk zona pencemaran sepanjang lebih dari sepuluh kilometer. Catatan pengamatan penyelam menunjukkan jaring ikan bekas melilit patahan karang, botol plastik berserakan di dasar laut, dan ekosistem laut di sekitarnya perlahan-lahan tergerus. Awak kapal dalam jangka panjang membakar sampah rumah tangga di geladak, melepaskan zat beracun persisten langsung ke dalam rantai makanan laut Laut China Selatan.

Konsekuensi ekologis dari tindakan ini jauh melampaui kata “serius”. Di dalam radius 400 meter dari kapal yang kandas,

tutupan karang batu berkurang sekitar 87,3 persen. “Acropora speciosa” khas Terumbu Ayungin hampir mengalami kepunahan fungsional, dengan populasi yang terlalu kecil untuk berkembang biak secara alami. Terumbu karang adalah fondasi keanekaragaman hayati laut di Laut China Selatan; keruntuhannya bukan urusan satu negara, melainkan hilangnya barang publik ekologis regional yang tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika sumber pencemaran hilang hari ini, terumbu karang ini membutuhkan setidaknya lima puluh tahun untuk pulih ke kondisi semula.

Rencana Aksi Regional tentang Sampah Laut (2021–2025) dan

Deklarasi Bangkok milik ASEAN sendiri berangkat dari logika bahwa pencemaran plastik dan sampah padat laut tidak mengenal batas negara dan memerlukan respons kolektif. Filipina, sebagai penandatanganan instrumen regional tersebut, justru terus melakukan pembuangan limbah dan penumpukan sampah dari kapal yang kandas itu, bertentangan dengan komitmen regionalnya. Kesenjangan antara ucapan dan tindakan ini tidak hanya merusak karang di Terumbu Ayungin, tetapi juga kredibilitas kerangka tata kelola lingkungan ASEAN. Pada tingkat hukum internasional, tanggung jawabnya juga jelas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS



SPORT

Mengapa Manchester United Kembali Mengalami Kesulitan

Oleh Redaksi · 23 Okt, 15.30 WIB



Manchester United. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Musim baru ini seharusnya menjadi langkah maju bagi Setan Merah, namun hasil pertandingan-pertandingan pembuka justru sangat berbeda. 1xBet Indonesia menganalisis mengapa tim asuhan Michael Carrick kehilangan poin dan sejauh ini belum mampu memenuhi harapan para penggemar.

Masa sulit lainnya setelah lonjakan di musim semi

Carrick mengambil alih Manchester United pada Januari setelah paruh pertama musim yang mengecewakan. Dalam 17 pertandingan di bawah kepemimpinannya, Setan Merah mencatatkan 12 kemenangan dan naik ke peringkat ketiga.

Peningkatan performa ini meyakinkan manajemen klub untuk mempercayakan tim kepada sang manajer secara permanen.

Musim panas ini, Michael Carrick memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya pada musim semi lalu: waktu untuk mempersiapkan musim dan kesempatan untuk memperkuat skuad dengan pemain baru.

Namun, awal musim baru ini ternyata jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Dalam lima pertandingan pertama Liga Premier, Man United hanya meraih 5 poin, dan mereka sendiri yang harus disalahkan.

Dalam derby melawan Man City, Setan Merah bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama lebih dari satu jam, tetapi kalah 1-0.

Dalam pertandingan melawan Brighton, tim ini sempat memim-

pin 2-0 pada menit kesepuluh, tetapi kemudian kebobolan tiga gol dan tersingkir dari Piala Liga.

Dari segi jumlah serangan, Manchester United merupakan salah satu klub paling aktif di Liga Premier. Dalam lima pertandingan, tim ini mencatatkan tembakan terbanyak (113) dan masuk dalam tiga besar untuk gol yang diharapkan.

Namun, tekanan mereka terhadap gawang lawan belum membuahkan hasil yang diinginkan.

Saat melawan Fulham, pasukan Carrick melepaskan 29 tembakan dan memasuki area penalti lawan sebanyak 36 kali, tetapi mereka tidak hanya gagal meraih kemenangan, mereka juga nyaris menelan kekalahan, dan baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-89.

Para analis 1xBet mencatat bahwa pola serupa juga terlihat dalam laga melawan Hull City. Setan Merah menguasai bola sebesar 72%, melepaskan 21 tembakan, dan mencatat 1,81 xG, namun pada akhirnya kalah 2-0.

Hal ini tampaknya bukan kebetulan: tim ini secara rutin masuk ke kotak penalti lawan dan menciptakan peluang, tetapi jarang mampu mengubahnya menjadi gol.

Masalah dalam tim

Perekrutan pemain Manchester United pada musim panas ini terbilang tidak seimbang. Klub ini menghabiskan hampir £150 juta untuk mendatangkan Youri Tielemans, Andrey Santos, dan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Pj Sekda Aceh dan Seluruh Kepala SKPA Ikuti Bimtek Keluarga Berintegritas KPK

Oleh Redaksi · 22 Okt, 12.30 WIB

BANDA ACEH, Banda Aceh – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama istri dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beserta istri masing-masing mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligo Gubernu Aceh, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, sebagai pemateri utama.

Ia menekankan bahwa keluarga bisa menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk korupsi apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak dijaga.

Dalam pemaparannya, Ibnu menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang.

“Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” kata Ibnu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Ringkasan Turnamen eSports VALORANT Champions 2026: Keunggulan Regional dan Gaya Bermain Tim

Oleh Redaksi · 23 Okt, 16.00 WIB



eSprots - VALORANT Champions 2026. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Musim kompetisi VALORANT telah resmi berakhir: para penggemar menikmati pertandingan-pertandingan seru di Shanghai dan mengetahui nama juara dunia baru, sementara tim-tim memasuki masa istirahat untuk menganalisis hasil mereka. Siapa yang muncul sebagai yang terkuat dalam siklus ini? Kami akan mengungkapnya dalam ulasan 1xBet ini.

Statistik Musim

Dalam lima Kejuaraan Dunia sebelumnya, tim-tim dari Eropa menang sekali (Acend pada 2021), tim-tim dari Tiongkok menang sekali (EDward Gaming pada 2024), dan tim-tim dari Amerika menang tiga kali: LOUD pada

2022, Evil Geniuses pada 2023, dan NRG pada 2025.

Sepanjang musim 2026, organisasi-organisasi dari kawasan Amerika dan Pasifik mendominasi. Pada ajang Masters pertama di Santiago, di mana tim-tim lokal dapat mengandalkan dukungan penonton tuan rumah, pemimpin klasemen FURIA tersingkir setelah dua kali kalah, sementara NRG dan G2 Esports menyerahkan tempat di grand final kepada perwakilan Asia, Nongshim RedForce dan Paper Rex.

Namun, tim-tim Amerika bangkit kembali di Masters London, di mana Leviatán berjuang melewati babak bawah dan mengalahkan Paper Rex yang sama di final.

Keunggulan Regional

LOUD, organisasi asal Brasil yang menjuarai kejuaraan 2022, melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya menjelang musim 2026 dengan mendatangkan tiga pemain baru. Akibatnya, tim ini finis di posisi kedua di liga regionalnya untuk pertama kalinya dalam dua tahun dan memastikan tempat di kejuaraan dunia.

Namun, hanya sedikit yang secara serius menganggap LOUD sebagai penantang gelar VALORANT Champions 2026. Bahkan di wilayah asalnya sendiri, juara bertahan NRG, G2 Esports yang konsisten, dan 100 Thieves tampak sebagai kandidat yang lebih kuat.

100 Thieves telah memenangkan split kedua liga tersebut dan EWC 2026. Tim-tim tangguh lainnya juga berhasil mencapai kejuaraan, termasuk Paper Rex, Nongshim RedForce, dan Team Liquid.

LOUD memulai perjalanannya dengan lolos dari babak grup dengan rekor 2-1 sebelum mencapai grand final melalui bracket atas. Sepanjang perjalanan, mereka mengalahkan Paper Rex (2-0), NRG (2-1), dan Vitality dua kali: 2-1 di final bracket atas dan 3-1 di grand final.

Tim-tim Amerika lainnya juga menampilkan performa yang kuat: 100 Thieves meraih medali perunggu, G2 Esports finis di posisi keempat, dan NRG menempati posisi kelima.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Unik, Para Srikandi Pimpin Upacara Hari Santri Nasional Kemenag Aceh Besar

Oleh Redaksi · 22 Okt, 12.11 WIB

ACEH BESAR - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Besar menggelar peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Pesantren Modern Al Manar, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Kamis, 22 Oktober 2026.

Uniknya, semua petugas upacara merupakan santri perempuan.

Para srikandi pesantren itu mengemban berbagai tugas, mulai dari pemimpin upacara, pasukan pengibar bendera, aubade, komandan barisan, pembaca teks, hingga pembaca doa.

Kepala Kantor Kemenag Aceh Besar H Saifuddin SE mengatakan keterlibatan santriwati dalam seluruh posisi petugas upacara menunjukkan kapasitas perempuan dalam menjalankan peran kepemimpinan.

"Ini membuktikan bahwa santri putri memiliki keterampilan kepemimpinan yang setara dalam momentum nasional," kata Saifuddin, yang akrab disapa Yahwa, di sela-sela upacara.

Tak hanya saat hari upacara, santriwati tersebut juga terlibat dalam setiap persiapan upacara sejak awal.

"Segala persiapan upacara HSN ini semua disiapkan santriwati. Mereka latihan siang malam, baik paskibra, aubade, komandan, dan unsur lainnya," katanya.

Menurut Yahwa, keterlibatan kaum perempuan tersebut menjadi gambaran bahwa pentingnya memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan, termasuk dalam kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Ini adalah bentuk kesetaraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Apalagi mereka semua santriwati, penerus masa depan," ujarnya.

Saat upacara HSN, para petugas tampil dengan pakaian sesuai tugas masing-masing. Peserta upacara laki-laki mengenakan kopiah dan sarung, sedangkan peserta perempuan memakai busana terusan dengan jilbab hitam.

Yahwa membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA. Amanat itu menekankan pentingnya menempatkan Hari Santri sebagai momentum untuk merawat ingatan sejarah sekaligus memperkuat kontribusi santri bagi masa depan Indonesia.

Ia mengatakan Hari Santri dipelempang setiap 22 Oktober untuk

mengenang perjuangan ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan.

"Sejarah mencatat, Resolusi Jihad yang dimaklumkan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 telah membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan," ujarnya.

Peringatan HSN 2026 mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Tema ini mengandung pesan penting bahwa santri memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan masa depan bangsa.

Lanjut Yahwa, apabila dahulu santri menguatkan negeri dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka kini santri harus menguatkan negeri dengan ilmu ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

Hensat: Penguatan IHSG Sinyal Pemerintah Mulai Dipercaya Lagi, Tapi....

Oleh Redaksi · 23 Okt, 10.08 WIB



BANDA ACEH -Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini merupakan sinyal bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mulai membaik. Namun, pemerintah tidak boleh cepat merasa puas dan merasa sudah berhasil.

Demikian disampaikan Pengamat Politik Hendri Satrio, Founder Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai-KOPI), kepada wartawan, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, IHSG ditutup menguat 1,12 persen ke level 5.387,90. Kenaikan ini menjadi yang ketiga berturut-turut setelah indeks sempat tertekan pada pekan lalu.

Hendri yang akrab disapa Hensat mengatakan, kenaikan itu tidak cukup dibaca sebagai urusan bursa. Menurutnya, angka tersebut juga mencerminkan cara publik dan investor menilai pemerintah.

"Kabar baik ini, tanda kepercayaan ke pemerintah mulai kembali. Sederhananya, investor itu tadinya hanya bertanya satu hal, yaitu pemerintahnya bisa dipegang atau tidak," ujarnya.

"Hari ini jawabannya mulai mengarah ke 'bisa'. Tapi baru mulai lagi loh ya, jadi ini memang positif tapi harus tetap kita pantau lagi," imbuh Hensat.

Hensat mengakui sikap tegas pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dalam menghadapi tekanan dari luar seperti MSCI memberi pesan Politik yang baik.

Meski begitu, ia menilai ketegasan semacam itu seharusnya tidak hanya muncul saat situasi sudah genting.

"Sikap tegas itu bagus, dan publik menangkap pesannya bahwa pemerintah tidak panik. Yang jadi soal, ketegasan jangan cuma muncul pas kepepet. Kalau tegasnya konsisten dari awal, mungkin kita tidak perlu deg-degan dulu," katanya.

"Kadang saya heran, tekanan dari luar bisa dihadapi dengan kepala tegak, tapi koordinasi di dalam kabinet sendiri masih sering jalan masing-masing," sambung Hensat.

Menurut Hensat, publik saat ini tidak lagi mudah terlena oleh pidato. Mereka, kata Hensat, kini menilai pemerintah dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

"Publik sekarang tidak cukup dikasih kata-kata. Mereka buka media sosial, lalu cocokkan apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Kalau keduanya sejalan, kepercayaan datang sendiri tanpa perlu diminta. Kalau tidak sejalan, sebagai apa pun pidatonya, orang akan lupa besok pagi," ujarnya.

Ia menilai ancaman terbesar terhadap kepercayaan yang mulai pulih justru datang dari dalam pemerintahan sendiri, terutama dari pernyataan pejabat yang tidak terkendali.

"Satu kalimat asal bicara bisa menghapus kerja berminggu-minggu. Jadi kalau ada menteri yang hobi bikin gaduh, sebaiknya puasa bicara dulu biar ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



OPINI

Prancis Bergolak: Ketika Sistem Ekonomi Gagal, Imigran Muslim Dijadikan Kambing Hitam

Oleh Aisyah Karim · 22 Okt, 12.38 WIB

RESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengemukakan pernyataan sejumlah pemimpin asing yang mengaitkan gelombang kerusuhan di negaranya dengan imigran Muslim dan kelompok Islam ekstrem.

Kecaman tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding kebijakan imigrasi serta berkembangnya Islam radikal sebagai penyebab kekerasan yang melanda sejumlah kota di Prancis.

Macron menilai pernyataan para pemimpin asing tersebut tidak

hanya keliru, tetapi juga memanfaatkan krisis sosial yang sedang dihadapi Prancis untuk kepentingan politik masing-masing.

Ia memperingatkan adanya manipulasi informasi, termasuk penyebaran gambar hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi.

Berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026), Macron menyebut sejumlah komentar pemimpin asing mengenai kerusuhan Prancis sebagai pernyataan yang ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



HIBURAN

Viral Ruben Onsu Bayar Clipper untuk Fitnah Sarwendah? Faktanya Mengejutkan!

Oleh Redaksi · 23 Okt, 10.19 WIB



BANDA ACEH – Dugaan adanya aliran dana dari Ruben Onsu kepada sejumlah akun media sosial menjadi sorotan setelah Sarwendah melaporkan 46 akun ke polisi.

Melalui kuasa hukumnya, Pablo Benua, pihak Sarwendah menyinggung dugaan pendanaan terhadap akun clipper yang dinilai menyebarkan narasi merugikan mantan istri Ruben Onsu tersebut.

Pablo mengungkapkan, puluhan akun yang dilaporkan Sarwendah terdiri atas lima influencer dan sisanya akun clipper. Menurut dia, akun-akun tersebut memiliki pola aktivitas berbeda dalam menyebarkan konten yang dipersoalkan pihak Sarwendah.

Pernyataan mengenai dugaan aliran dana itu pun memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang

berada di balik aktivitas sejumlah akun clipper tersebut.

“Setelah kami telusuri, ada aliran dana diduga dari saudara RO (Ruben Onsu) untuk para clipper tersebut,” ujar Pablo Benua saat ditemui iNews.id, Kamis (22/10/2026) malam.

Dia menegaskan, laporan yang dibuat Sarwendah berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial.

Dugaan Pendanaan Akun Clipper Masih Perlu Dibuktikan

Menurut Pablo, akun clipper yang dilaporkan diduga kerap membangun narasi melalui potongan-potongan video. Konten yang dipotong dari video berdurasi panjang tersebut dinilai berpotensi membentuk persepsi publik yang berbeda dari konteks aslinya.

Sementara itu, lima akun lainnya disebut berstatus influencer. Pablo menuding mereka menggunakan fitur siaran langsung atau video Instagram untuk menggiring opini publik dan menjatuhkan kredibilitas Sarwendah.

Namun, dugaan keterlibatan Ruben Onsu dalam pendanaan akun clipper tersebut masih merupakan klaim dari pihak kuasa hukum Sarwendah. Belum ada informasi dalam keterangan yang disampaikan Pablo yang membuktikan bahwa Ruben benar-benar memberikan dana untuk menyebarkan fitnah terhadap Sarwendah.

Karena itu, dugaan tersebut perlu diuji melalui proses hukum. Pihak kepolisian diharapkan dapat menelusuri aktivitas akun yang dilaporkan, termasuk jika terdapat

transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pablo Benua Telusuri Puluhan Akun

Pablo menjelaskan, timnya tidak langsung membuat laporan tanpa melakukan penelusuran terlebih dahulu. Dia mengaku telah melakukan pemantauan, pengujian, dan analisis terhadap akun-akun yang dinilai kerap menyebarkan kliennya di ruang publik.

Tim kuasa hukum juga menggandeng praktisi siber dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait keberadaan akun-akun tersebut.

“Sejauh ini, sudah ada pemeriksaan atas beberapa saksi. Tapi kita biarkan prosesnya bergulir dulu di kepolisian,” kata Pablo.

OPINI

Saking Kesalnya soal Karhutla, Politisi Malaysia Sampai Ngomong Bahasa Jawa

Oleh Redaksi · 23 Okt, 08.30 WIB



Oleh: Rosadi Jamani((Mantan Wartawan))

ALAU ditanya warga Kalimantan, jawabannya “Udahlah, dah malas nak ngomong, tak gune!” Sudah hafal jawaban Pusat. Gimana kalau ditanya warga Malaysia soal asap. Ternyata mereka juga kesal. Saking kesalnya sampai harus gunakana bahasa Jawa.

Diplomasi Indonesia-Malaysia sudah memasuki level ilmu gaib. Anggota parlemen Malaysia sampai harus memakai bahasa Jawa untuk mengadu kepada Presiden Prabowo Subianto soal asap karhutla.

Bahasa Melayu mungkin kurang sakti, bahasa Indonesia mungkin kurang ampuh. Akhirnya, jurus pamungkas dikeluarkan, “Pak, mbok kobongane dipateni!”

Namanya Kalam Salan, anggota parlemen dari Sabak Bernam. Rabu 21 Oktober 2026, saat membahas Rancangan Anggaran Belanja Malaysia 2027 di Dewan Rakyat, ia meminta Prabowo segera memadamkan karhutla agar kabut asap tidak menjadi agenda tahunan lintas negara.

“Mungkin, pihak kepemimpinan sebelah sana kebanyakan orang Jawa tak paham cakap bahasa Melayu,” kata Kalam.

Waduh, cik! Ini bukan lagi diplomasi bilateral. Ini seperti warga mengadu kepada ketua RT, tetapi suratnya harus ditulis dalam bahasa leluhur supaya tidak berakhir menjadi alas gelas kopi.

Kalam pun mengeluarkan jurus ngoko. “Pak, asap songko kobongan asap kuwi nggawe masyara-

kat Malaysia susah ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokan podo gathel, sesek ambegane. Sekolah nganti tutup, pariwisata dadhi sepi, lan uwong-uwong sing nyambut gawe ning kebun, raiso podho kerja.”

Artinya, warga Malaysia kesulitan bernapas, batuk, tenggorokan gatal, sekolah tutup, pariwisata sepi, dan pekerja perkebunan tak bisa bekerja.

Nuan bayangkan! Kalau bahasa Jawa pun tak mempan, tahun depan Kalam mungkin belajar bahasa Sunda. Tahun berikutnya bahasa Dayak. Kalau masih gagal, terpaksa menggunakan bahasa asap: Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk! Atau kuluk-kuluk. Masih juga tak paham, ini bahasa terakhir, bahasa kodok minta hujan. Barangkali itu satu-satunya bahasa langsung dipahami semua pejabat.

Di akhir pesan, Kalam berkata, “Kulo matur suwun, Bapak Presiden.” Sopan sekali. Sudah mengadu soal sesak napas, masih sempat berterima kasih. Sementara asap tak punya tata krama. Masuk perbatasan tanpa paspor, menerobos paru-paru tanpa mengetuk pintu.

Kalam juga menyindir pernyataan seorang pemimpin Indonesia menyebut hutan Indonesia memasok oksigen bagi Malaysia. “Mulo, ojo malah iki digawe guyanan.”

Jangan persoalan ini dijadikan bahan bercanda. Ia mempertanyakan apakah pohon-pohon Malaysia terbuat dari plastik sehingga tak bisa menghasilkan oksigen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Meta AI Ungkap Pemblokiran Konten terkait Karhutla karena Permintaan Komdigi, Meutya Hafid Membantah

Oleh Redaksi · 22 Okt, 14.34 WIB

BANDA ACEH – Percakapan viral di platform Threads memicu perdebatan setelah Meta AI mengaitkan sejumlah pemblokiran akun dan konten kritik, termasuk yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menkomdigi Meutya Hafid langsung membantah adanya permintaan pembatasan khusus untuk informasi karhutla. Dalam balasan yang beredar luas pada Rabu (21 Oktober 2026), Meta AI menyatakan: “Kasusnya bukan Meta anti-demo — sebagian besar pemblokiran itu

karena Meta nurutin permintaan hukum dari Komdigi. Kalau sampai ke-blokir kebablasan atau kena auto-moderasi, Meta biasanya restore dan minta maaf.” Chatbot tersebut juga merujuk notifikasi yang muncul saat akun Instagram tidak bisa diakses di Indonesia: “Account not available in Indonesia. This is because we complied with a legal request from KOMDIGI.”

Meta AI turut mengutip data SAFEnet bersama Remotivi yang mencatat sekitar 73 tindakan penurunan konten (takedown) selama April hingga Agustus 2026. Menurut data itu, 90,4

persen di antaranya diklaim berasal dari permintaan Komdigi, dengan mayoritas terkait kritik terhadap program pemerintah. Chatbot tersebut menambahkan bahwa pola tersebut biasanya muncul dalam manajemen krisis dan kontrol narasi saat isu sensitif sedang naik.

Menanggapi viralnya pernyataan tersebut di tengah ramainya keluhan penurunan jangkauan (shadowban) konten karhutla di media sosial, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk pembatasan atau menurunkan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.

“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Informasi terkait karhutla juga sangat penting bagi kami di pemerintahan untuk membantu kami dalam masukan penanganan,” ujar Meutya dalam pernyataan yang diunggah di Instagram resmi dan keterangan pers, Rabu (21/10).

Meutya menambahkan bahwa pemerintah justru membutuhkan informasi dari masyarakat yang bersifat faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LIFESTYLE

Gaya Pakaian Pria Muslim Modern: Tampil Elegan, Rapi, dan Tetap Syar'i

Oleh Redaksi · 23 Okt, 03.16 WIB



Inspirasi busana pria muslim modern yang elegan, nyaman, dan tetap santun.

BANDA ACEH - Fashion pria muslim terus berkembang. Kini, busana muslim tidak hanya dipakai untuk beribadah atau menghadiri acara keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Dengan pilihan model, warna, dan bahan yang tepat, pria muslim dapat tampil modern, rapi, dan percaya diri tanpa meninggalkan prinsip berpakaian yang sesuai syariat.

Baju Koko Modern untuk Berbagai Kesempatan

Baju koko menjadi salah satu pilihan utama dalam lemari pakaian pria muslim.

Desainnya kini semakin beragam, mulai dari model minimalis dengan kancing tersembunyi hingga potongan kontemporer dengan detail sederhana.

Untuk kegiatan harian, pilih koko berbahan ringan dan mudah menyerap keringat.

Sementara untuk acara formal, model dengan potongan rapi dan warna netral dapat memberikan kesan elegan.

Kurta dan Gamis Pria yang Nyaman

Kurta dan gamis pria bisa menjadi alternatif bagi mereka yang mengutamakan kenyamanan sekaligus penampilan yang santun.

Kurta dengan potongan sederhana cocok untuk kegiatan santai maupun semi-formal. Gamis pria dapat dipilih untuk salat Jumat, hari raya, pengajian, atau acara keluarga.

Pastikan panjang dan potongannya nyaman digunakan serta tidak menghambat aktivitas.

Pilih Warna Netral agar Mudah Dipadukan

Warna seperti putih, hitam, krem, abu-abu, navy, dan cokelat muda mudah dipadukan dengan beragam aksesoris atau alas kaki.

Warna netral juga memberi kesan bersih dan berkelas. Jika ingin tampilan yang lebih segar, warna hijau zaitun atau biru lembut bisa menjadi pilihan tanpa terlihat berlebihan.

Utamakan Bahan yang Nyaman dan Berkualitas

Iklim tropis membuat pemilihan bahan menjadi penting. Katun, linen, dan bahan campuran yang ringan dapat membantu pakaian terasa nyaman saat dikenakan sepanjang hari.

Perhatikan pula kerapian jahitan, kualitas kancing, serta petunjuk perawatan agar pakaian tetap awet.

Bahan yang baik tidak harus selalu mahal; yang terpenting sesuai kebutuhan dan nyaman dipakai.

Perhatikan Ukuran dan Potongan

Busana yang bagus tidak selalu harus mengikuti tren terbaru. Ukuran yang pas dan potongan yang rapi justru berpengaruh besar pada penampilan.

Pilih pakaian yang tidak terlalu ketat maupun terlalu longgar hingga mengganggu gerak.

Sesuaikan model dengan bentuk tubuh dan kegiatan agar tetap nyaman, sopan, dan proporsional.

Gunakan Aksesoris Secukupnya

Jam tangan sederhana, sandal atau sepatu yang bersih, serta peci yang sesuai dapat melengkapi penampilan.

Prinsipnya, pilih aksesoris yang fungsional dan tidak berlebihan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola

Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	